



2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS

*DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP*

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengarahkan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu selama lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun berlandaskan prinsip evidence-based planning dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah, perubahan regulasi, serta arahan kebijakan nasional dan daerah, khususnya amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Berbagai isu strategis seperti transformasi ekonomi menuju sektor non-ekstraktif, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan investasi, serta peluang yang muncul dari keberadaan Ibu Kota Nusantara menjadi landasan analitis dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Besar harapan kami, Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 dapat menjadi instrumen perencanaan yang efektif, selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, serta mampu mendorong peningkatan investasi dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman yang konstruktif dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Desember 2025


ALFIAN NOOR, SE, M.Ling
Pembina Utama Muda
NIP. 19690113 199503 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.1.2.1 Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja	10
2.1.2.2 Keadaan Sarana dan Prasarana	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.1.3.1 Kinerja Pelayanan Periode Renstra Sebelumnya	32
2.1.3.2 Indikator Kinerja Utama	32
2.1.3.3 Kinerja Pembangunan Sektoral tahun 2021-2026	40
2.1.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	61
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	63
2.1.4.1 Mitra Pendukung Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan	63
2.1.4.2 Dukungan BUMD dan BUMN dalam pencapaian kinerja Perangkat daerah	67
2.1.4.3 Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah	70

2.2	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis	72
2.2.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	72
2.2.1.1	Isu Permasalahan Investasi: Nasional dan Kabupaten Kutai Kartanegara	73
2.2.1.2	Isu Kebijakan Investasi: Kebijakan Pemerintahan RI	73
2.2.1.3	Identifikasi Permasalahan Perizinan dan Penanaman Modal	74
2.2.1.4	Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	83
2.2.2	Penentuan Isu-isu Strategis	85
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		88
3.1	Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029	85
3.2	Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029	90
3.3	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	93
3.3.1	Rumusan strategis	93
3.4	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	103
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		109
4.1	Uraian Program	109
4.2	Uraian Kegiatan	112
4.3	Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	165
4.4	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	204
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	208
4.6	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	210
BAB V PENUTUP		212
5.1	Kesimpulan Substansial	212
5.2	Kaidah Pelaksanaan	212
5.3	Pengendalian dan Evaluasi	212
5.4	Evaluasi Berbasis Urusan Pemerintahan Daerah	213

5.5 Tindak Lanjut	213
-------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan	11
Tabel 2.2 Data Aset DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Per 31 Desember Tahun 2025	15
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tujuan (<i>outcome</i>) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara	29
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara	34
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara	34
Tabel 2.6 Realisasi Investasi dan Pertumbuhan Investasi dari tahun 2021-2025	41
Tabel 2.7 Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur	42
Tabel 2.8 Perbandingan Realisasi Investasi PMA Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Timur	42
Tabel 2.9 Realisasi Investasi Persub sektor Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan 2024	43
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan (Program) dari tahun 2021-2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	47
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan (Kegiatan) dari tahun 2021-2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51
Tabel 2.12 Peran Mitra Perangkat Daerah	66
Tabel. 2.13 Tabel Peran BUMD dan BUMN dalam Pencapaian target kinerja DPMPTSP	68
Tabel 2.14 Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	80
Tabel 2.15 Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	86
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	89
Tabel 3.2 Sasaran Perangkat Daerah tahun 2025-2029	92
Tabel 3.3 Analisis SWOT	95
Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD	101
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	103

Tabel 4.1 Tabel Penjenjangan Kinerja DMPTSP	112
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan	118
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan ...	166
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	205
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	209
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP	211

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9
Gambar 2.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan	13
Gambar 2.3. Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Gambar 2.4 Pertumbuhan Investasi 2021-2025 di Kabupaten Kutai Kartanegara	31
Gambar 3.1 Hubungan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra	91
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dan Tujuan Renstra PD	91
Gambar 3.3 Matrik SWOT	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan jangka menengah atau dokumen rencana strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah bertujuan memberikan arah yang jelas, terukur, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga tercipta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi tersebut menjadi acuan utama dalam penyelarasan substansi, struktur, serta tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah, sekaligus menegaskan pentingnya konsistensi perencanaan antara pusat dan daerah, keterpaduan lintas sektor, serta penguatan fokus pada capaian outcome yang terukur.

Penyusunan dokumen ini juga berada pada momentum penting, yakni pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2025. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih menjadi arah kebijakan pembangunan lima tahun

ke depan yang wajib dijabarkan secara sistematis ke dalam RPJMD dan selanjutnya diturunkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Renstra Perangkat Daerah harus mampu mengakomodasi prioritas pembangunan kepala daerah yang baru, sekaligus memastikan kesinambungan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Inmendagri 2 Tahun 2025. Tahapan dimulai dari (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Ranwal Renstra; (3) Penyampaian Ranwal RPJMD kepada PD; (4) Penyampaian Rancangan Renstra PD; (5) Forum Perangkat Daerah / Lintas PD; (6) Verifikasi Rancangan Renstra PD; (7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD; (8) Reviu APIP; (9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD; (10) Penetapan Perkada Renstra PD. Seluruh proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa dokumen Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki mandat strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu. Dalam konteks dinamika pembangunan daerah, DPMPTSP berperan sebagai pintu depan pelayanan publik di bidang perizinan dan non-perizinan, serta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

Secara empiris, struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara masih didominasi oleh sektor ekstraktif, khususnya pertambangan. Kondisi ini menimbulkan kerentanan ekonomi sekaligus tantangan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menekankan transformasi ekonomi menuju sektor non-ekstraktif seperti pertanian, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa produktif yang tertuang dalam Misi ke-2 Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif. Dalam hal ini, DPMPTSP memiliki peran sentral dalam memfasilitasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

Selain itu, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan peluang sekaligus tantangan. Peluang tersebut berupa meningkatnya kebutuhan investasi pada sektor infrastruktur, logistik, penyediaan pangan, serta jasa penunjang lainnya. Namun, tantangan yang dihadapi adalah memastikan agar investasi tersebut dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi objektif, amanat regulasi, serta peluang dan tantangan yang ada, DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki nilai strategis sebagai berikut: (1) Sebagai garda terdepan pelayanan publik di bidang perizinan dan non-perizinan yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan daerah; (2) Sebagai motor penggerak investasi daerah, baik dalam menarik investasi baru maupun menjaga keberlanjutan investasi yang telah ada; (3) Sebagai fasilitator transformasi ekonomi daerah melalui peningkatan investasi pada sektor non-ekstraktif yang berkelanjutan; dan (4) Sebagai jembatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Dengan demikian, penyusunan Renstra PD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan proses yang penting dan strategis, yang memadukan arahan regulasi, visi kepemimpinan daerah, serta mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi, agar dapat menjawab tantangan pembangunan dan mewujudkan cita-cita masyarakat Kutai Kartanegara lima tahun ke depan. Secara khusus, dalam urusan penanaman modal, Renstra ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan realisasi investasi, serta mendorong transformasi ekonomi daerah melalui penguatan sektor-sektor non-ekstraktif yang berdaya saing.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 6. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
 7. Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang menjadi pedoman bagi DPMPSTSP Kutai Kartanegara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan memastikan adanya keselarasan arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

1. Menjadi acuan strategis dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah selama periode lima tahun.
2. Menjamin keterpaduan, keselarasan, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Menetapkan arah, sasaran, serta target kinerja perangkat daerah yang terukur dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.
4. Menjadi instrumen evaluasi kinerja perangkat daerah melalui indikator yang terukur, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029;

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.1 Uraian Program;

4.2 Uraian Kegiatan;

4.3 Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

5.1 Kesimpulan Subtansial

5.2 Kaidah Pelaksanaan

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

5.4 Evaluasi Berbasis Urusan Pemerintahan

5.5 Tindak Lanjut

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk membantu Bupati untuk melaksanakan tugas bidang urusan Penanaman Modal serta dekonsentrasi dan tugas bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

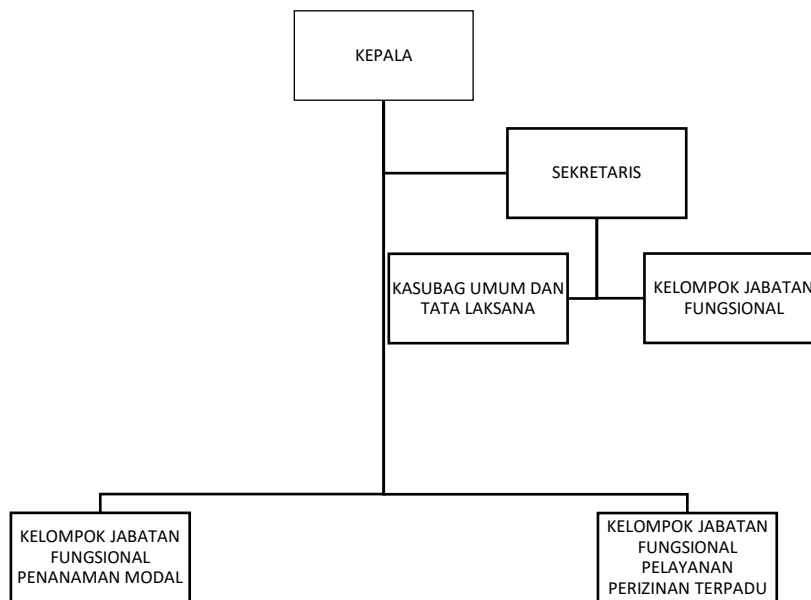
Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Falisitasi Pembinaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- d. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam lingkup dinas;
- e. Penyusunan Proses Bisnis Dinas;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pelaksanaan dan penataan pelayanan perizinan berbasis risiko;
- i. Pelaksanaan tata kelola penanaman modal;
- j. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kasubag Umum Dan Tata Laksana
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Uraian tugas dalam struktur secara singkat disampaikan sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintah wajib di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyajikan data dan informasi, serta mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan umum dan ketatalaksanaan, kepegawaian serta penyusunan program dan keuangan.

Dibawah sekretaris terdapat 2 bagian:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan, yang mempunyai tugas mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi urusan umum dan ketatalaksanaan.
2. Kelompok jabatan Fungsional.

- a. Kepegawaian yang dijabat oleh Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
- b. Penyusunan Program dan Keuangan yang dijabat oleh Perencana Ahli Muda

Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Promosi, Pengembangan Iklim, dan Pengendalian Penanaman Modal dalam Upaya meningkatkan realisasi Penanaman Modal. Adapun Jabatan Fungsional tersebut yaitu:

1. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya;
2. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
3. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama.

Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pelayanan elektronik, fasilitasi pelayanan, konsultasi, data dan sistem informasi, serta penguasaan dalam upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu. Adapun Jabatan Fungsional tersebut yaitu :

1. Penata Kelola Perizinan Ahli Madya;
2. Penata Kelola Perizinan Ahli Muda;
3. Penata Kelola Perizinan Ahli Pertama.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, komposisi pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 berjumlah total 119 jiwa terdiri dari 66 ASN dan 53 orang Tenaga Kontrak dengan rincian sebagaimana berikut:

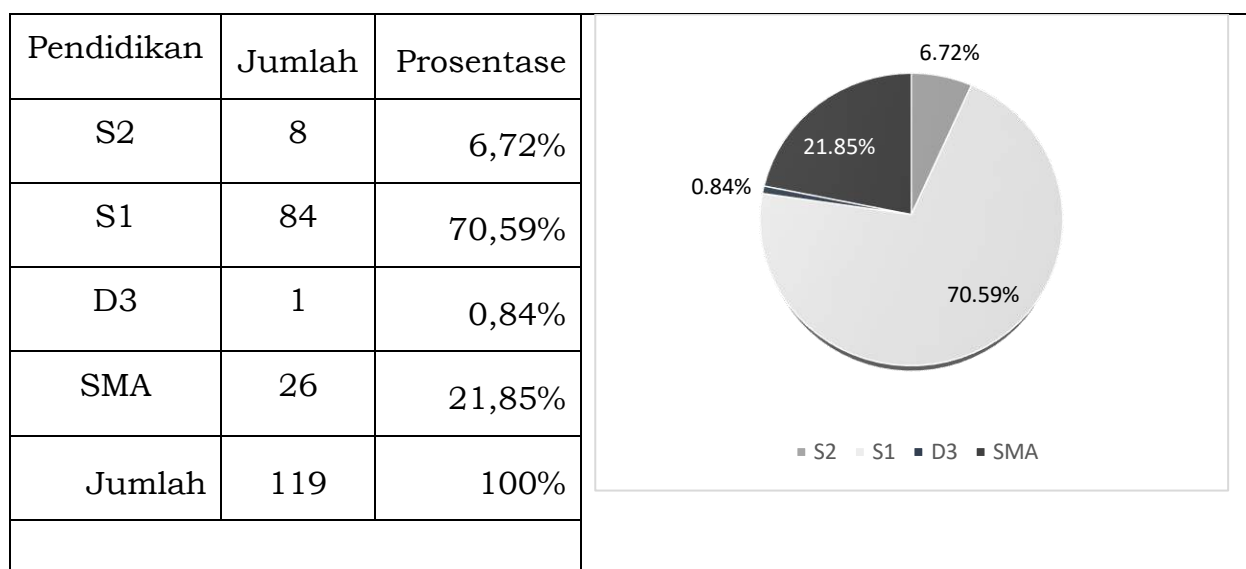
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan

Kode	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Pemangku	Kekurangan	Kelebihan
2.18.01	Kepala Dinas	14	1	1	0	0
2.18.01.01	Sekretaris Dinas	12	1	1	0	0
2.18.01.01.01	Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, Dan Kepegawaian	9	1	1	0	0
2.18.01.01.01.01	Arsiparis Penyelia	8	0	0	0	0
2.18.01.01.01.02	Arsiparis Ahli Pertama	8	1	0	1	0
2.18.01.01.01.03	Arsiparis Mahir	7	1	0	1	0
2.18.01.01.01.04	Arsiparis Terampil	6	0	0	0	0
2.18.01.01.01.05	Penata Layanan Operasional	7	8	0	8	0
2.18.01.01.01.06	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0	0
2.18.01.01.01.07	Pengelola Layanan Operasional	6	2	0	2	0
2.18.01.01.01.08	Pengolah Data dan Informasi	6	3	3	0	0
2.18.01.01.01.09	Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0	0
2.18.01.01.02	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1	1	0	0
2.18.01.01.03	Perencana Ahli Muda	10	1	0	1	0
2.18.01.01.04	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1	0	1	0
2.18.01.01.05	Perencana Ahli Pertama	8	1	0	1	0
2.18.01.01.06	Penata Layanan Operasional	7	16	0	16	0
2.18.01.01.07	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	4	0	0
2.18.01.01.08	Pengelola Layanan Operasional	6	2	0	2	0
2.18.01.01.09	Pengolah Data dan Informasi	6	5	5	0	0
2.18.01.01.10	Pengadministrasi Perkantoran	5	3	3	0	0

Kode	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Pemangku	Kekurangan	Kelebihan
2.18.01.02	Penata Perizinan Ahli Madya	12	2	2	0	0
2.18.01.03	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	0	0	0
2.18.01.04	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	12	3	1	2	0
2.18.01.05	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	0	0	0	0
2.18.01.06	Penata Perizinan Ahli Muda	10	3	3	0	0
2.18.01.07	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	10	7	7	0	0
2.18.01.08	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	0	0	0
2.18.01.09	Arsiparis Ahli Pertama	8	2	0	2	0
2.18.01.10	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	8	10	2	8	0
2.18.01.11	Penata Perizinan Ahli Pertama	8	3	3	0	0
2.18.01.12	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	4	0	4	0
2.18.01.13	Penata Layanan Operasional	7	2	0	2	0
2.18.01.14	Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	5	0	0
2.18.01.15	Pengelola Layanan Operasional	6	2	0	2	0
2.18.01.16	Pengolah Data dan Informasi	6	14	14	0	0
2.18.01.17	Pengadministrasi Perkantoran	5	6	6	0	0
	Jumlah		119	66	53	0

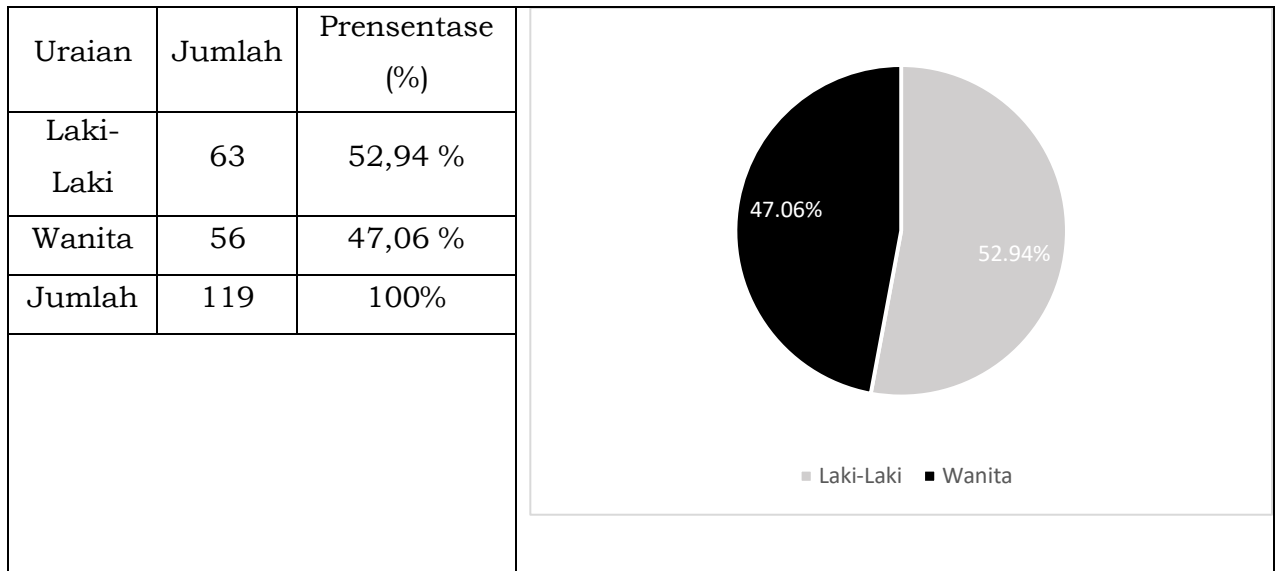
Berdasarkan analisa jabatan, dapat dihitung kebutuhan pegawai sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.1, dimana masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 36 orang dan sebagai bentuk optimalisasi tugas dan fungsi instansi karena kurangnya dukungan tenaga SDM dari Aparatur Sipil Negara (ASN), kekurang tersebut diisi oleh PPPK dengan Jabatan penata Kelola Sistem Informasi sebanyak 4 orang, Penata Layanan Operasional sebanyak 22 orang, Pengadministrasi perkantoran sebanyak 16 Orang, dan tenaga kontrak sebanyak 11 orang. Dengan adanya PPPK ini diharapkan organisasi dapat bekerja optimal dalam membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 2.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan data pada gambar dan tabel 2.2 diatas tingkat pendidikan SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 84 orang (70,59%), disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 26 orang (21,85%), S2 sebanyak 8 orang (6,72%), D3 sebanyak 1 orang (0,84%).

Gambar 2.3. Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang relatif seimbang. Dari total 119 pegawai, sebanyak 63 orang atau 52,94 persen berjenis kelamin laki-laki dan 56 orang atau 47,06 persen berjenis kelamin perempuan. Data ini mencerminkan bahwa DPMPTSP telah memberikan ruang partisipasi yang hampir setara bagi laki-laki dan perempuan dalam struktur organisasi, sehingga potensi sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya dominasi gender tertentu. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menekankan keadilan, inklusivitas, dan kesetaraan kesempatan kerja.

Keseimbangan komposisi gender tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan. Keterlibatan perempuan yang signifikan dalam struktur kepegawaian DPMPTSP berkontribusi terhadap pengambilan keputusan yang lebih responsif, sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada pelayanan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia di DPMPTSP tidak hanya mencerminkan pemenuhan prinsip kesetaraan gender, tetapi juga mendukung pencapaian kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel.

2.1.2.2 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai data asset tetap dan asset lainnya per 31 Desember 2025 terdapat sebanyak 1.564 item barang senilai Rp. 20.981.282.382,75 dengan garis besar rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Data Aset DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara
Per 31 Desember Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)	KONDISI ASET
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1.315	18.729.373.224,00	Baik
	ALAT BESAR	2	18.750.000,00	Baik
	- alat pengangkat lainnya (dst)	1	1.250.000,00	Baik
	- electric generating set lainnya (dst)	1	17.500.000,00	Baik
	KOMPUTER	464	8.448.848.620,00	Baik
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	47	592.735.679,00	Baik
	- Local Area Network (LAN)	11	115.830.000,00	Baik
	- Komputer Jaringan lainnya	1	8.250.000,00	Baik
	- P.C Unit	70	1.976.513.395,00	Baik
	- Lap Top	51	1.211.543.415,00	Baik
	- Note Book	11	257.570.400,00	Baik
	- Tablet PC	2	26.399.150,00	Baik
	- Hard Disk	15	251.073.785,00	Baik
	- Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	1	5.772.000,00	Baik
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	27.236.000,00	Baik
	- CPU (Peralatan Personal Komputer)	4	122.222.000,00	Baik
	- Monitor	40	1.435.820.700,00	Baik
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	154	729.376.376,00	Baik
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	15	170.933.900,00	Baik
	- Capture Card	2	4.928.000,00	Baik
	- External/ Portable Hardisk	3	8.842.500,00	Baik
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	1	35.039.000,00	Baik
	- Server	4	1.268.915.440,00	Baik
	- Router	1	2.113.100,00	Baik
	- Hub	8	9.590.880,00	Baik
	- Wireless Access Point	3	33.300.000,00	Baik
	- Switch	1	36.110.000,00	Baik
	- Peralatan Jaringan lainnya	15	68.200.000,00	Baik
	- Peralatan Komputer lainnya	3	50.532.900,00	Baik
	ALAT EKSPLORASI	1	32.340.000,00	Baik
	- alat eksplorasi topografi lainnya lainnya (dst)	1	32.340.000,00	Baik
	PERALATAN OLAH RAGA	2	23.972.000,00	Baik
	- Peralatan Permainan lainnya	2	23.972.000,00	Baik
	ALAT ANGKUTAN	11	2.036.279.450,00	Baik
	- Station Wagon	5	1.221.679.450,00	Baik
	- Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	450.100.000,00	Baik
	- Sepeda Motor	2	34.610.000,00	Baik
	- Kapal Visual Mini	2	95.920.000,00	Baik
	- kapal terbang lainnya (dst)	1	233.970.000,00	Baik
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	39	342.950.000,00	Baik
	- Battery Charge	8	18.395.000,00	Baik
	- Reciver	1	15.000.000,00	Baik
	- Global Positioning System	5	185.405.000,00	Baik
	- Scanner (Universal Tester)	25	124.150.000,00	Baik
	ALAT PERTANIAN	1	4.028.000,00	Baik
	- Lemari Penyimpan	1	4.028.000,00	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)	KONDISI ASET
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	687	6.860.418.014,00	Baik
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	9.600.000,00	Baik
	- Mesin Fotocopy Folio	2	14.660.000,00	Baik
	- Lemari Besi/Metal	6	52.073.000,00	Baik
	- Lemari Kayu	32	497.580.000,00	Baik
	- Rak Besi	18	28.116.000,00	Baik
	- Filing Cabinet Besi	4	10.000.000,00	Baik
	- Brandkas	3	57.903.500,00	Baik
	- Kontainer	1	94.787.000,00	Baik
	- Lemari Kaca	3	13.125.000,00	Baik
	- CCTV - Camera Control Television System	20	34.750.000,00	Baik
	- White Board	1	33.243.000,00	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	9	32.507.000,00	Baik
	- Mesin Absensi	4	68.056.000,00	Baik
	- Display	1	10.000.000,00	Baik
	- Mesin Laminating	1	120.157.500,00	Baik
	- Alat Sidik Jari	2	97.884.500,00	Baik
	- Papan Nama Instansi	1	1.500.000,00	Baik
	- Alat Kantor Lainnya	17	84.243.796,00	Baik
	- Meja Kerja Kayu	14	814.698.000,00	Baik
	- Meja Rapat	1	35.959.000,00	Baik
	- Meja Resepsionis	1	121.256.250,00	Baik
	- Meja Tambahan	32	271.101.879,00	Baik
	- Meja Panjang	14	78.768.200,00	Baik
	- Kursi Tamu	8	21.200.000,00	Baik
	- Partisi	13	23.712.299,00	Baik
	- Sofa	6	72.682.000,00	Baik
	- Lemari Es	6	13.365.000,00	Baik
	- A.C. Window	3	16.500.000,00	Baik
	- A.C. Split	34	649.272.000,00	Baik
	- Kipas Angin	3	11.907.900,00	Baik
	- Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1.750.000,00	Baik
	- Rice Warmer	1	26.875.000,00	Baik
	- Tabung Gas	2	2.000.000,00	Baik
	- Mixer	1	7.700.000,00	Baik
	- Televisi	18	600.120.500,00	Baik
	- Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	10.000.000,00	Baik
	- Loudspeaker	2	8.200.000,00	Baik
	- Sound System	1	19.088.000,00	Baik
	- Wireless	1	5.430.000,00	Baik
	- Microphone	1	3.265.900,00	Baik
	- Microphone Table Stand	8	13.332.000,00	Baik
	- Camera Video	1	3.926.000,00	Baik
	- Camera film	5	86.699.900,00	Baik
	- Lambang Garuda Pancasila	2	3.000.000,00	Baik
	- Tiang Bendera	1	2.000.000,00	Baik
	- Dispenser	17	235.749.000,00	Baik
	- Mimbar/Podium	1	10.234.000,00	Baik
	- Handy Cam	2	25.818.000,00	Baik
	- Alat Pemanas Ruangan	2	2.592.000,00	Baik
	- Lampu	4	13.506.900,00	Baik
	- Alat Pemadam Kebakaran lainnya	7	12.210.550,00	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	127.451.000,00	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	137.843.200,00	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	172.304.000,00	Baik
	- Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	11.845.250,00	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	36	182.457.500,00	Baik
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	17	201.369.250,00	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)	KONDISI ASET
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	19.600.000,00	Baik
	- Meja Tamu Biasa	1	1.215.014,00	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	39.842.333,00	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	24.616.333,00	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1	7.736.333,00	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	77	296.048.426,00	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	74	444.822.664,00	Baik
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	30.945.332,00	Baik
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	41	317.189.653,00	Baik
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	15.472.666,00	Baik
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	2	15.472.666,00	Baik
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	20	84.860.000,00	Baik
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	37	245.219.820,00	Baik
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	68	557.402.390,00	Baik
	- Audio Mixing Console	2	13.620.000,00	Baik
2	- Audio Mixing Portable	1	10.516.000,00	Baik
	- Audio Mixing Stationer	1	1.815.000,00	Baik
	- Audio Phone In	4	4.312.000,00	Baik
	- Microphone/Wireless MIC	6	20.551.800,00	Baik
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	20	95.482.000,00	Baik
	- Digital Audio Taperecorder	2	4.530.280,00	Baik
	- Cable	4	5.720.000,00	Baik
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	2	4.488.000,00	Baik
	- Camera Electronic	4	86.308.240,00	Baik
	- Video Monitor	2	9.300.000,00	Baik
	- Video Switcher	1	21.340.000,00	Baik
	- Tripod Camera	1	1.089.000,00	Baik
	- Lensa Kamera	1	21.500.000,00	Baik
	- Layar Film/Projector	3	34.985.000,00	Baik
	- Camera Digital	3	144.170.070,00	Baik
	- Lampu Blitz Kamera	1	1.925.000,00	Baik
	- Video Conference	1	14.300.000,00	Baik
	- LCD Monitor	2	8.450.000,00	Baik
	- Alat Studio Video Lainnya	2	19.300.000,00	Baik
	- Telephone Mobile	2	10.600.000,00	Baik
	- Facsimile	1	2.000.000,00	Baik
	- Audio Monitor	2	21.100.000,00	Baik
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	6.480.000,00	Baik
	- Kursi Dorong	1	3.985.000,00	Baik
	- Alat Kedokteran umum lainnya	1	2.495.000,00	Baik
	ALAT LABORATORIUM	34	386.684.750,00	Baik
	- Stabilizer	1	4.364.800,00	Baik
	- Meja Kerja	32	379.048.000,00	Baik
	- Portable Noise Monitoring	1	3.271.950,00	Baik
	ALAT PERSENJATAAN	4	11.220.000,00	Baik
	- Lemari Camera	1	6.270.000,00	Baik
	- Bateray Pack Camera	2	3.300.000,00	Baik
	- Tripot Background	1	1.650.000,00	Baik
	EKS BPMPD	249	2.251.909.158,75	Baik
KOMPUTER	69	708.328.488,77	Baik	
- P.C Unit	19	226.933.610,26	Baik	
- Lap Top	16	261.173.298,77	Baik	
- Note Book	5	108.955.000,00	Baik	
- Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	90.322.579,74	Baik	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)	KONDISI ASET
	- External	3	13.475.000,00	Baik
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	1	7.469.000,00	Baik
	ALAT ANGKUTAN	16	609.127.000,00	Baik
	- kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	192.000.000,00	Baik
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	233.200.000,00	Baik
	- Sepeda Motor	13	183.927.000,00	Baik
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	53.900.000,00	Baik
	- Global Positioning System	1	8.140.000,00	Baik
	- alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	45.760.000,00	Baik
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	148	781.299.469,98	Baik
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	15	44.715.000,00	Baik
	- Mesin Penghitung Uang	1	5.775.000,00	Baik
	- Lemari Besi/Metal	6	20.460.000,00	Baik
	- Filing Cabinet Besi	8	26.950.000,00	Baik
	- Lemari Makan	1	5.005.000,00	Baik
	- Mesin Absensi	2	12.045.000,00	Baik
	- Display	3	72.314.000,00	Baik
	- Meja Rapat	1	1.370.800,00	Baik
	- Meja 1/2 Biro	3	15.773.670,00	Baik
	- Kursi Tamu	11	34.865.000,00	Baik
	- Sofa	2	50.050.000,00	Baik
	- Jam Mekanis	1	10.775.000,00	Baik
	- Mesin Pemotong Rumput	1	3.000.000,00	Baik
	- Lemari Es	4	10.360.500,00	Baik
	- A.C. Split	8	84.317.999,98	Baik
	- Televisi	5	112.205.000,00	Baik
	- Sound System	1	9.350.000,00	Baik
	- Wireless	1	14.630.000,00	Baik
	- Mic Conference	1	56.540.000,00	Baik
	- Tangga Aluminium	3	6.190.000,00	Baik
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	3	7.300.000,00	Baik
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	22	42.471.000,00	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2.310.000,00	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	6.160.000,00	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	16	16.544.000,00	Baik
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	24	109.822.500,00	Baik
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4	46.365.000,00	Baik
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	1	12.155.000,00	Baik
	- Camera Electronic	1	12.100.000,00	Baik
	- Slide Projector	1	12.430.000,00	Baik
	- Lensa Kamera	1	9.680.000,00	Baik
	ALAT LABORATORIUM	4	44.494.000,00	Baik
	- Generator Set (Lab Scale)	1	15.014.000,00	Baik
	- Layar	1	14.850.000,00	Baik
	- Vacuum Drying Oven	2	14.630.000,00	Baik
	ALAT PERSENJATAAN	6	8.395.200,00	Baik
	- Dispencer	6	8.395.200,00	Baik
	TOTAL	1.564	20.981.282.382,75	

Sementara dalam era digital ini DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki 14 sarana media informasi, database maupun pelayanan publik yang berbasis digital diantaranya:

1. Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara : www.dpmpstsp.kukarkab.go.id;
2. Aplikasi database penanaman modal: NSWI (*National Sistem Windows For Investment*) merupakan sistem penanaman modal dari pemerintah pusat;
3. Online Single Submission/OSS (merupakan sistem pelayanan perizinan terpadu dari pemerintah pusat);
4. Sistem SSO (*Single Sign On*) merupakan penyediaan identitas data pengguna dan mengaautentifikasi agar dapat mengakses aplikasi penyedia layanan : lawang-mpp.kukarkab.go.id ;
5. Aplikasi Pelongseng (Pelayanan Online Dengan Sistem Elektronik Berbasis Jaringan) merupakan aplikasi untuk mengurus perizinan yang telah terintegrasi dengan sistem SSO yang dimiliki oleh Mal Pelayanan Publik Kutai Kartanegara. Fitur yang terdapat dalam aplikasi pelongseng terdapat fitur pengajuan izin secara online, persyaratan pengajuan izin, hingga pengambilan izin dan fitur download secara mandiri : layanannya-mpp.kukarkab.go.id;
6. Sistem web MPP merupakan aplikasi yang berisi informasi latar belakang, tupoksi, fasilitas gedung MPP, Layanan OPD/Instansi yang tergabung dalam MPP, Berita, pengumuman dan informasi lainnya, serta terkoneksi dengan sistem booking/daftar antrian online: mpp.kukarkab.go.id;
7. Call Center Nomor :0811-5944-009;
8. *Smart Arsip* berfungsi untuk memudahkan pengelolaan arsip secara digital, sistematis, terstruktur dan aman dengan websitenya smartarsip.kukarkab.kotapintar.id;
9. *Touchscreen* MPP merupakan aplikasi media informasi berbasis web untuk penjelasan yang terkait semua aplikasi di MPP Kutai Kartanegara dalam bentuk video : touchscreen-mpp.kukarkab.go.id;
10. SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) merupakan aplikasi untuk menampilkan jumlah responden, Nilai SKM dan Statistik jumlah data pendidikan dari keseluruhan Responden. Serta form pengisian data responden dan ada sebanyak 9 pertanyaan untuk pengunjung setelah mendapatkan pelayanan;

11. Metaverse sebagai media interaksi pelayanan peizinan dapat dilakukan secara virtual tanpa warga kota harus datang secara fisik ke kantor pemerintahan. metaverse-mpp.kukarkab.go.id;
12. Antrian MPP merupakan aplikasi pengambilan nomor antrian pelayanan : antrian-mpp.kukarkab.go.id;
13. Aplikasi drive thru merupakan aplikasi untuk memproses pencetakan dan pengambilan berkas yang diselesaikan dari pihak MPP: antrianonline.kukarkab.kotapintar.id/main/formdrivethru;
14. Aplikasi ACM (Anjungan Cetak Mandiri) sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencetak produk-produk layanan MPP. Seperti dokumen SK Izin dan dokumen-dokumen produk MPP yang support untuk dicetak di mesin ACM, serta dapat mencetak informasi-informasi terkait layanan dan persyaratan : acmkukar.kotapintar.id;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, disebutkan dalam Pasal 42 dan 43 bahwa Sarana dan Prasarana penyelenggaraan PTSP paling sedikit meliputi:

1. Kantor depan (*front office*) paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.
2. Kantor belakang (*back office*) paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.
3. Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang *difabel* dan manula, ruang bermain anak, ruang arsip dan perpustakaan, toilet/kamar mandi, tempat ibadah, tempat parkir, ruang/tempat penjualan makanan dan minuman.
4. Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon dan mesin faksimile, perangkat komputer, printer, *scanner*, mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin foto kopi, kamera pengawas (CCTV), koneksi internet, laman/website dan e-mail, alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply* (UPS), alat pemadaman kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, *banner*, petunjuk arah lokasi dan alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP-elektronik, paling sedikit meliputi: koneksi internet; aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan (*tracking system*),

jejak audit (*audit trail*), *sms gateway*, dan arsip digital; pusat data (*data center*), dan *server* aplikasi dan pengamanan; telepon pintar (*smartphone*); dan alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang ada saat ini di DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menambahkan dan memperbaiki fasilitas yang ada seperti ruang rapat yang *representatif*, ruang tunggu, ruang bermain anak, ruang laktasi, dan masih banyak fasilitas yang perlu di penuhi baik di *front office*, *back office*, ruang pendukung dan alat/fasilitas pendukung, termasuk fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan PTSP-elektronik.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja Perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RENSTRA dapat dicapai.

Indikator kinerja Perangkat Daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Kesemuanya tergambar didalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tujuan (*outcome*)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN/PMA	Persentase Pertumbuhan Investasi PMDN/PMA	1,68	1,71	30,47	30,6	0	36,22	90,63	51,38	10,84	0	2155,95	5300,00	168,62	35,42	100

Berdasarkan data pada tabel 2.3, indikator Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN/PMA menunjukkan bahwa target Renstra Perangkat Daerah pada periode 2021–2026 telah tercapai dimana target pertumbuhan pada akhir renstra berada pada 1,79 persen maka dari itu pada tahun 2022 dimana banyaknya investasi baru masuk yang berhubungan dengan Ibu Kota Nusantara disamping sektor pertambangan dan perkebunan menyebabkan pertumbuhan menjadi 90,63% dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sendiri mencapai 5300 persen bahkan pada beberapa tahun realisasi melampaui target yang ditetapkan. Hal ini membuat Dinas Penanaman Modal melakukan Penyesuaian target walaupun pada masa itu belum berakhirnya periode renstra.

Namun demikian, memasuki tahun 2025 dilakukan penyesuaian target kinerja dimana Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu menargetkan pertumbuhan investasi sebesar 30,60 persen kembali akan tetapi mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan ke III pertumbuhan investasi terus melambat dan pada akhir triwulan III mencapai -29,18 persen. Sebagai respons terhadap dinamika dan kondisi aktual perekonomian, dimana Perlambatan pertumbuhan investasi pada triwulan III tahun 2025 berdampak signifikan terhadap capaian indikator pertumbuhan nilai investasi sehingga target yang sebelumnya telah tercapai perlu disesuaikan agar tetap realistis, terukur, dan mencerminkan kondisi riil penyesuaian tersebut kami lakukan dengan melihat tren pertumbuhan nilai investasi per triwulan dari tahun 2020 triwulan I sampai dengan Tahun 2025 triwulan ke III dengan mempertimbangkan penurunan signifikan tahun 2025 sebesar -29,18 persen dengan harapan potensi pemulihan ekonomi daerah. Dengan baseline baru yaitu 0 persen. Kebijakan diarahkan pada stabilisasi proyek aktif, promosi investasi produktif, dan transformasi menuju investasi hijau dan berkelanjutan untuk mendukung visi RPJMD 2025–2030. Penyesuaian ini bukan merupakan penurunan komitmen kinerja, melainkan bentuk kehati-hatian dalam perencanaan yang adaptif dan berbasis data, sekaligus untuk menjaga kredibilitas perencanaan dan konsistensi antara target, realisasi, serta proyeksi capaian kinerja pada akhir periode Renstra.

Gambar 2.4 Pertumbuhan Investasi 2021-2025
di Kabupaten Kutai Kartanegara



Dilihat dari grafik 2.4 pertumbuhan investasi mengalami pertumbuhan yang pesat pada tahun 2022 yang disebabkan oleh investasi pada Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu pada tahun 2023 kami melakukan perubahan target kinerja untuk target lima tahun dari tahun 2021-2026 yang sudah terpenuhi pada Rencana Kerja Tahun 2022. Tetapi perubahan target tersebut berakibat pada pencapaian pertumbuhan investasi yang menurun di tahun 2023 dan 2024, tetapi kalau dilihat pada tahun 2024 saja pertumbuhan investasi yang belum mencapai target.

Pencapaian Tingkat Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif hal ini disebabkan karena :

1. Fluktuatif harga komoditas dimana Kabupaten Kutai Kartanegara masih ketergantungan pada sektor pertambangan dan energi menyebabkan *volatilitas* investasi ketika harga batu bara dan minyak turun;
2. Krisis ekonomi global, dimana ekonomi dunia mengalami perlambatan yang mempengaruhi arus modal masuk ke Indonesia termasuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Regulasi lingkungan yang ketat menyebabkan beberapa industri besar yang bergerak pada sektor tambang dan industri mengalami kendala terkait perizinan lingkungan;
4. Ketimpangan infrastruktur di wilayah tertentu dimana beberapa kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur penting.

5. Persaingan dengan daerah lain yang telah mempunyai kawasan industri atau sentra-sentra industri yang lebih berkembang daripada Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1.3.1 Kinerja Pelayanan Periode Renstra Sebelumnya

Pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja Perangkat daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu Perangkat daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

2.1.3.2 Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja utama yang tertuang dalam RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, terdapat 2 indikator kinerja utama, secara keseluruhan indikator sudah tercapai dengan optimal. Ke-2 indikator tersebut meliputi Nilai Realisasi Investasi dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

Secara keseluruhan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan, namun demikian menjadi titik berat investasi masih pada sektor primer dimana Pertambangan masih menjadi primadona dalam investasi. Akan tetapi sekarang untuk sektor sekunder dan tersier juga mulai ikut berkembang setelah adanya Ibu Kota Nusantara yaitu pada sektor sekunder indukstri makanan dan transportasi mulai banyak diminati sedangkan pada sektor tersier yaitu pada sektor Perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Akan tetapi Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri masih belum mempunyai sentra kawasan industri yang akan dikembangkan.

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara diukur berdasarkan capaian nilai Realisasi Investasi dan hasil survey mandiri indeks kepuasan masyarakat. Sampai dengan tahun 2025 capaian nilai Realisasi Investasi sebesar 16,42 Triliun Rupiah sehingga melampaui target pada tahun 2025 sebesar 7,45 Triliun Rupiah dengan capaian kinerja sebesar 220,40 persen.

Sedangkan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) berdasarkan survey pada akhir tahun 2025 mencapai nilai 96,51 melampaui target yang ditetapkan sebesar 89,52 capaian kinerja sebesar 107,81% dari target yang ditetapkan. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	3,23	7	7,2	7,35	7,45	5,13	9,78	14,81	16,42	16,42	158,82	139,71	205,69	223,40	220,40
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di DPMPSTP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	87,12	87,75	88,25	89,52	90,04	91,35	91,96	92,91	96,51	103,49	104,86	104,80	105,28	107,81

Dalam struktur APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara, kurun waktu 2021 – 2026 Total belanja di tahun 2021 sebesar Rp 17.223.526.938,- sedangkan di tahun 2025 meningkat menjadi Rp 21.179.471.884,-. Meningkatnya Belanja ini dipengaruhi dengan adanya peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan MPP. Dimana setiap Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia diwajibkan untuk mendirikan pusat pelayanan satu pintu yang diberi nama Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik ini merupakan wujud dari komitmen Presiden kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan kemudahan berusaha diseluruh Kabupaten/Kota melalui kemudahan perizinan berbasis risiko. Selain itu terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari pusat diantaranya Dana Alokasi Khusus Non fisik guna percepatan penyelenggaraan penanaman modal dan pada akhir tahun 2023 Dana Insentif Daerah Guna Pengendalian Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga terdapat dana bagi hasil dari *The Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)* dari World Bank diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui kegiatan penurunan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Adapun Perkembangan Pendanaan yang digunakan untuk kegiatan penanaman modal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Anggaran Perangkat Daerah					Realisasi Anggaran Perangkat Daerah					Rasio antara Realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran (%)	Realisasi (%)
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi (PMDN/ PMA)	Nilai Realisasi Insvestasi (PMDN/PMA)	16.590.250.393,0	17.857.721.371,00	19.253.992.674,00	19.915.492.214,00	19.821.512.909,00	14.462.040.331,00	15.679.040.830,00	18.322.441.227,00	17.797.151.099,00	17.768.485.964,00	87,17	87,80	95,16	89,36	89,64	19,48	22,86
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di DPMPSTP	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	633.276.545,00	8.744.709.664,00	6.580.445.366,00	3.436.906.636,00	1.357.958.975	609.524.100,00	7.273.350.173,00	6.669.998.917,00	1.640.181.788,00	609.087.989,00	96,25	83,17	101,36	47,72	44,85	114,43	-0,07

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran pada DPMPTSP dari tahun 2021 hingga 2024 untuk dua indikator utama, yaitu Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Angka-angka ini menggambarkan kinerja anggaran baik dari sisi target maupun capaian realisasi, serta rasio pencapaiannya terhadap rencana yang ditetapkan setiap tahunnya. Analisis ini penting untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran sekaligus menakar konsistensi pertumbuhan kinerja keuangan organisasi. Akan tetapi pada tahun 2025 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dimana setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan efisiensi anggaran oleh karena itu juga berdampak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan pada Tabel 2.5 diatas terlihat pada rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -0,07 persen pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dikarenakan adanya efisiensi dan timbulnya utang pada paket pekerjaan di indikator tersebut.

Pada indikator Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA), target anggaran menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2021 ditetapkan target sebesar 16,59 milyar rupiah, meningkat pada tahun 2022 menjadi 17,85 milyar rupiah, lalu 19,25 milyar rupiah pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 19,91 milyar rupiah pada tahun 2024 serta mengalami penurunan pada tahun 2025 sebesar 19,82 milyar rupiah. fluktuasi ini menggambarkan adanya proyeksi optimisme pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan nilai investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA).

Sementara itu, pada realisasi anggaran indikator investasi, terlihat capaian tahun 2021 sebesar 14,46 milyar rupiah. Angka ini memang masih berada di bawah target, tetapi sudah mendekati dengan tingkat rasio 87,17%. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, realisasi meningkat menjadi sebesar 15,67 milyar rupiah dengan rasio 87,80%. Kenaikan berlanjut pada tahun 2023, mencapai 18,32 milyar rupiah, mendekati target sebesar 19,25 milyar rupiah dengan rasio yang lebih tinggi yakni 95,16%. Namun pada 2024 realisasi sedikit turun menjadi 17,79 milyar rupiah dengan rasio 89,36%. Dan di tahun 2025 realisasi 17,76 milyar rupiah atau dengan rasio sebesar 89,64%.

Apabila ditinjau dari rata-rata pertumbuhan anggaran, indikator investasi menunjukkan angka 19,48%. Hal ini menandakan pertumbuhan target anggaran yang relatif stabil setiap tahunnya. Tapi berbedadengan pertumbuhan realisasi justru naik sebesar 22,86%. Hal ini memperlihatkan

bahwa peningkatan target cukup signifikan juga mempengaruhi capaian realisasi anggaran tersebut. Walaupun ada beberapa kendala dalam perjalanannya salah satunya yaitu dana transfer daerah yang terlambat dan juga dikarenakan perubahan regulasi sehingga beberapa kegiatan tidak bisa berjalan optimal serta adanya efisiensi anggaran berdasarkan intruksi presiden nomor 1 Tahun 2025.

Indikator kedua adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menggambarkan kualitas pelayanan di DPMPTSP. Target anggaran indikator ini fluktuatif. Pada 2021, targetnya sebesar 633,27 juta rupiah, lalu melonjak drastis pada 2022 menjadi 8,74 milyar rupiah. Namun pada 2023 targetnya menurun menjadi 6,58 milyar rupiah dan pada 2024 semakin rendah lagi di angka 3,43 milyar rupiah. Begitu juga pada tahun 2025 yaitu sebesar 1,36 milyar rupiah. Fluktuasi ini menunjukkan adanya penyesuaian anggaran besar-besaran sesuai dengan kebijakan pelayanan publik yang berlaku.

Realisasi anggaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2021 sebesar 609,52 juta rupiah dengan rasio 96,25% terhadap target. Capaian ini sangat baik karena mendekati target penuh. Pada 2022, realisasi naik drastis mengikuti target, yakni mencapai 7,27 milyar rupiah meskipun hanya menyumbang rasio 83,17%. Tahun 2023, realisasi sebesar 6,66 milyar Rupiah bahkan sedikit melampaui target dengan rasio 101,36%. Namun pada 2024 terjadi penurunan drastis pada realisasi menjadi 1,64 milyar rupiah, sehingga rasio realisasi terhadap target hanya 47,72%. Dan pada tahun 2025 realisasi anggaran sebesar 609,088 juta rupiah dengan rasio 44,85%.

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan anggaran, indikator IKM mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu 114,43%. Hal ini disebabkan lonjakan anggaran besar pada 2022 yang membuat angka pertumbuhan sangat tinggi. Sedangkan untuk realisasi, rata-rata pertumbuhan mencapai -0,07. Angka ini memperlihatkan adanya ketidakstabilan pencapaian karena di tahun terakhir realisasi justru anjlok jauh di bawah target dikarenakan pemotongan DBH oleh pemerintah pusat sebesar 50%.

Perbandingan kedua indikator ini menunjukkan pola yang berbeda. Pada indikator investasi, baik target maupun realisasi cenderung stabil dengan pertumbuhan yang konsisten meskipun masih menghadapi kendala dalam mencapai target secara penuh. Sedangkan pada indikator IKM, terlihat fluktuasi yang sangat signifikan baik pada target maupun realisasi, yang

menandakan adanya dinamika kebijakan serta tantangan besar dalam menjaga konsistensi pelayanan publik.

Rasio realisasi terhadap target juga menjadi poin penting. Investasi cenderung stabil dengan rasio di kisaran 87–95%, menunjukkan bahwa meskipun target meningkat, realisasi relatif dapat mendekati harapan. Sebaliknya, IKM mengalami ketidakpastian yang tinggi: dari 96% pada 2021, turun menjadi 83% pada 2022, kemudian naik hingga 101% pada 2023, dan akhirnya jatuh drastis ke 47% pada 2024. Variasi ini menjadi indikator adanya permasalahan struktural dalam pengelolaan pelayanan.

Salah satu faktor penyebab naik-turunnya capaian IKM terkait dengan ketersediaan anggaran dan alokasi sumber daya yang tidak konsisten antar tahun. Perubahan kebijakan pemerintah daerah atau nasional yang berfokus pada reformasi pelayanan publik juga bisa menjadi pemicu fluktuasi. Hal ini berbeda dengan investasi yang lebih dipengaruhi oleh tren ekonomi makro, iklim investasi, dan kebijakan fiskal yang cenderung lebih stabil.

Dari sisi pertumbuhan rata-rata, data ini memperlihatkan bahwa DPMPSTSP masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesinambungan kinerja anggaran. Realisasi anggaran pada indikator Investasi yang cenderung stabil bisa menjadi kekuatan akan tetapi realisasi anggaran pada indikator IKM yang sangat fluktuatif menunjukkan kelemahan dalam perencanaan maupun pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan strategi perencanaan yang lebih realistis dan konsisten untuk memastikan pencapaian yang lebih seimbang.

Evaluasi terhadap realisasi anggaran ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan selanjutnya. Pemerintah daerah perlu menjaga tren positif investasi dengan terus memperbaiki iklim usaha, memberikan insentif yang menarik, serta memperkuat promosi investasi. Sementara untuk pelayanan publik, perlu ada penguatan kelembagaan, digitalisasi pelayanan, serta peningkatan kapasitas SDM agar kualitas pelayanan tidak mengalami penurunan seperti yang terjadi pada 2024 dan tahun 2025.

Secara keseluruhan, analisis tabel realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa DPMPSTSP memiliki kinerja yang relatif baik pada aspek investasi namun masih menghadapi tantangan besar pada aspek pelayanan publik. Ke depan, sinergi antara stabilitas anggaran, konsistensi kebijakan, dan komitmen peningkatan kualitas pelayanan menjadi kunci untuk mencapai kinerja optimal yang berkelanjutan.

2.1.3.3 Kinerja Pembangunan Sektoral tahun 2021-2026

Pembentukan penanaman modal atau investasi merupakan faktor penting yang memainkan peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Informasi mengenai potensi investasi dan iklim investasi daerah sangat diperlukan investor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi digunakan untuk produksi, sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa akan datang.

Daerah sudah saatnya menarik sebanyak mungkin investasi sebagai penggerak pembangunan daerah, sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat. Iklim investasi yang kondusif dapat menciptakan insentif untuk dunia usaha baik dalam bentuk perluasan lapangan kerja, ketersediaan usaha dan daya saing. Dalam aspek makro, kondisi tersebut juga menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan.

Pada tahun 2025 Kinerja investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan penurunan. Realisasi investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 16.415.888.215.433 rupiah sampai dengan triwulan ke IV atau sebesar 0% persen dari tahun 2024 pada Triwulan ke IV dengan nilai sebesar 16.415.888.215.433 rupiah. Perlambatan ini dikarenakan telah selesainya proyek-proyek penting di Kabupaten Kutai Kartanegara dan fluktuatif perekonomian dunia.

Investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan yang signifikan seperti terlihat dalam tabel berikut ini. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami lonjakan yang tinggi dengan adanya pembangunan IKN sebesar Rp 9.782.835.525.026. Dengan pertumbuhan Investasi sebesar 90,36 persen. Kenaikan Investasi ini tentu berdampak pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.6

Realisasi Investasi dan Pertumbuhan Investasi dari tahun 2021-2025

Tahun	Target Investasi		Total Target Investasi (PMA/PMDN) (Rp)	Realisasi Investasi		Total Realisasi Investasi (PMA/PMDN) (Rp)	Tingkat Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi (%)	Capaian dari Target (%)
	PMA	PMDN		PMA	PMDN			
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8(n-(n-1)/n-1)*100)	9 ((7/4)x100)
2021	2.048.916.716.275	1.187.178.942.604	3.236.095.658.879	1.812.295.320.000	3.319.584.600.000	5.131.879.920.000	36,22	159
2022	1.373.500.950.100	5.626.499.049.900	7.000.000.000.000	1.350.004.725.026	8.432.830.800.000	9.782.835.525.026	90,63	140
2023	1.979.064.216.921	5.285.114.303.031	7.264.178.519.952	5.004.650.534.555	9.804.607.469.680	14.809.258.004.235	51,38	204
2024	1.980.064.216.921	5.375.114.303.031	7.355.178.519.952	8.069.017.988.494	8.346.870.226.939	16.415.888.215.433	11,99	223
2025	3.200.000.000.000	4.200.000.000.000	7.400.000.000.000	5.655.368.522.720	10.760.519.692.713	16.415.888.215.433	0	221,84

Tabel 2.7

Perbandingan Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Kota di Provinsi
Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Realisasi Modal Investasi PMDN (Juta Rupiah)			Jumlah 3 Tahun
	2021	2022	2023	
Paser	567.121,50	1.616.947,70	2.458.132,40	4.642.201,60
Kutai Barat	1.437.227,90	2.631.773,80	3.253.522,50	7.322.524,20
Kutai Kartanegara	3.319.550,00	10.564.907,70	9.440.538,20	23.324.995,90
Kutai Timur	5.279.054,00	3.428.929,90	5.241.826,70	13.949.810,60
Berau	445.264,40	2.619.004,00	4.303.938,70	7.368.207,10
Penajam Paser Utara	404.886,00	1.253.095,90	1.475.716,70	3.133.698,60
Mahakam Ulu	575.498,90	284.958,90	189.188,70	1.049.646,50
Balikpapan	16.773.016,60	14.681.981,50	20.501.290,70	51.956.288,80
Samarinda	585.533,30	1.270.879,50	2.894.239,20	4.750.652,00
Bontang	910.229,60	1.243.154,10	2.413.301,90	4.566.685,60
Kalimantan Timur	30.297.382,20	39.595.633,00	52.171.695,70	122.064.710,90

Berdasarkan data Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat kedua setelah Kota Balikpapan dalam hal realisasi investasi selama 3 tahun berturut turut untuk PMDN sedangkan untuk PMA menduduki peringkat kedua setelah Kutai Timur.

Tabel 2.8

Perbandingan Realisasi Investasi PMA Kabupaten Kota di Provinsi
Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Realisasi Modal Investasi PMA (Ribu US \$)			Jumlah 3 tahun
	2021	2022	2023	
Paser	31.190,40	109.068,58	77.903,80	218.162,78
Kutai Barat	29.653,60	198.435,49	105.779,90	333.868,99
Kutai Kartanegara	122.865,60	180.418,48	331.153,70	634.437,78
Kutai Timur	248.360,80	630.925,93	458.235,80	1.337.522,53
Berau	35.752,70	49.370,49	46.997,30	132.120,49
Penajam Paser Utara	1.602,80	9.866,00	10.907,20	22.376,00
Mahakam Ulu	123,90	3.808,00	23.096,00	27.027,90
Balikpapan	193.184,10	51.882,79	244.869,10	489.935,99
Samarinda	17.125,00	32.438,00	23.518,30	73.081,30
Bontang	65.331,30	8,00	10.249,50	75.588,80
Kalimantan Timur	745.190,20	1.266.221,77	1.332.710,60	3.344.122,57

Realisasi investasi tersebut menunjukkan bahwa daya tarik investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat baik. Berdasarkan realisasi investasi tersebut selanjutnya digambarkan bidang usaha yang menonjol. Sebagaimana terdapat dalam data Portal *National Single Window for Investment* (NSWI), dimana saat ini situs nswi.bkpm.go.id sedang maintenance, data yang diunggah pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.9 Realisasi Investasi Persub sektor
Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2023 dan 2024

SEKTOR	PMDN				PMA			
	2023		2024		2023		2024	
	JUMLAH PROYEK	JUMLAH INVESTASI Rp. Juta	JUMLA H PROYE K	JUMLAH INVESTASI Rp. Juta	JUMLA H PROYE K	JUMLAH INVESTASI \$USD	JUMLA H PROYE K	JUMLAH INVESTASI \$USD
1	2			3				
PRIMER								
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	160	325.971.180.909	255	699.775.942.974	68	1.247.568.825.311	82	181.434.932
Kehutanan	77	313.693.542.581	147	208.824.173.756	6	13.867.910.605	12	1.769.069
Perikanan	1	-	4	-	-	-	-	-
Pertambangan	411	7.206.290.552.971	758	6.011.307.757.870	67	1.756.036.820.047	74	90.279.086
Total (Sektor)	649	7.845.955.276.461	1164	6.919.907.874.600	141	3.017.473.555.963	168	273.483.087
SEKUNDER								
Industri Makanan	77	222.521.640.691	103	192.822.013.029	30	103.650.800.465	39	23.878.444
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	10	6.218.413.128	19	3.696.800.000	1	-	4	61.900
Industri Mineral Non Logam	13	84.900.000	29	2.459.015.795	3	511.335.338.127	2	148.865
Industri tekstil	4	848.000.000	4	545.000.000	-	-	-	-
Industri barang dari kulit & alas kaki	-	-	3	59.800.000	-	-	2	25.000
Industri kayu	8	2.969.149.687	7	29.400.000	12	99.180.720.000	10	613.800
Industri kertas dan percetakan	7	-	30	34.962.800.000	-	-	-	-
Industri kimia dan farmasi	41	131.416.700.000	32	79.531.296.804	-	-	-	-
Industri karet dan plastik	1	-	8	145.000.000	-	-	4	147.352.600
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2	10.000.000	2	-	12	1.268.780.280.000	4	87.244.782
Industri instrumen kedokteran, presisi, optik, & jam	-	-	25	7.527.200.000	1	-	-	-
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	33	134.037.700.000	43	2.230.913.000	-	-	-	-
Industri lainnya	40	9.571.763.536	182	203.364.700.000	4	4.229.840.000	29	163.321.300
Total (Sektor)	236	507.678.267.042	487	527.373.938.628	63	1.987.176.978.592	94	96.004.091

SEKTOR	PMDN				PMA			
	2023		2024		2023		2024	
	JUMLAH PROYEK	JUMLAH INVESTASI Rp. Juta	JUMLA H PROYE K	JUMLAH INVESTASI Rp. Juta	JUMLA H PROYE K	JUMLAH INVESTASI \$USD	JUMLA H PROYE K	JUMLAH INVESTASI \$USD
1	2			3				
PRIMER								
TERSIER								
Listrik, Gas dan Air	87	122.853.995.480	168	7.783.746.882	-	-	4	-
Konstruksi	255	97.885.514.828	574	133.676.613.693	-	-	4	75.233
Perdagangan dan Reparasi	292	836.680.223.427	547	194.322.236.284	18	17.555.965.810	20	1.360.260
Hotel & restoran	27	69.563.216.250	51	9.002.546.123	3	-	2	-
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	234	175.636.898.805	353	79.929.693.720	22	11.441.934.662	31	889.661
Perumahan, kawasan industri & perkantoran	54	42.441.648.315	93	380.986.719.630	3	-	3	1.000
Jasa lainnya	161	105.912.429.072	284	296.976.557.379	9	-	8	2.799.900
Total (Sektor)	1110	1.450.973.926.177	2070	1.102.678.113.711	55	28.997.900.472	72	5.126.054
JUMLAH	2073		3563		245	311.153.700	305	537.934.533
TOTAL (Rp)		9.440.538.200.000		8.346.870.226.939		4.667.305.500		8.069.017.995.000
TOTAL PMDN + PMA (Rp)	2318	14.407.843.700.000					3868	16.415.888.221.939

Berdasarkan tabel 2.9 menunjukkan investasi yang menonjol di Kabupaten Kutai Kartanegara masih sektor primer yaitu Pertambangan dan Perkebunan, dua sektor ini masih menjadi daya tarik investasi. Disisi lain dalam hal perijinan kedua sektor ini bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten, tatapi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi DPMPSTSP untuk mendorong sektor sekunder maupun sektor tersier.

Selanjutnya dalam pencapaian indikator kinerja Utama terdapat 6 program dan 14 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rasio capaian sudah melebihi 100% untuk 6 program yang diampu oleh DPMPSTSP, hal ini tentu memberikan dorongan kepada dinas untuk lebih meningkatkan pelayanan terkait dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Seperti Tabel 2.11 dibawah ini:

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan (Program) dari tahun 2021-2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75,88	78	80	73	82	94,9	74,13	78,5	108,07	121,67	92,66	107,53
Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	602	625	640	652	970	867	2318	3868	161,13	138,72	362,19	593,25
Jumlah Investor PMDN/PMA	112	200	260	310	195	227	284	280	174,11	113,50	109,23	90,32

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Jumlah Izin	678	750	850	10000	990	6173	12796	12757	146,02	823,07	1505,41	127,57
Penaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN/PMA)	8,28	8,28	30,4	30,68	36,22	90,63	51,38	10,85	437,44	1094,57	169,01	35,37
Jumlah Aplikasi	1	15	3	3	1	14	4	3	100,00	93,33	133,33	100,00

Pada Tabel 2.10 untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan capaian yang relatif baik sepanjang periode 2021–2024. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi nilai akuntabilitas melampaui target yang ditetapkan dengan rasio capaian masing-masing sebesar 108,07 persen dan 121,67 persen, mencerminkan penguatan tata kelola kinerja, perencanaan, serta pelaporan yang semakin akuntabel. Meskipun pada tahun 2023 rasio capaian menurun menjadi 92,66 persen akibat penyesuaian standar penilaian dan peningkatan kompleksitas indikator, kinerja kembali menunjukkan perbaikan pada tahun 2024 dengan rasio capaian 107,53 persen. Hal ini menandakan adanya konsistensi upaya perbaikan sistem manajemen kinerja instansi.

Pada indikator Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA, realisasi kinerja secara konsisten melampaui target pada seluruh tahun pengukuran. Rasio capaian yang sangat tinggi, terutama pada tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing mencapai 362,19 persen dan 593,25 persen, menunjukkan tingginya minat investasi serta efektivitas fasilitasi penanaman modal yang dilaksanakan. Peningkatan signifikan ini dipengaruhi oleh kemudahan perizinan, promosi investasi, serta dukungan kebijakan yang mendorong realisasi proyek baru baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing.

Indikator Jumlah Investor PMDN/PMA menunjukkan capaian yang bervariasi namun tetap berada pada tingkat yang relatif baik. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi investor melampaui target dengan rasio capaian masing-masing sebesar 174,11 persen dan 113,50 persen. Pada tahun 2023 capaian masih berada di atas target, meskipun dengan rasio yang lebih moderat. Namun pada tahun 2024, rasio capaian menurun menjadi 90,32 persen, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menarik investor baru, antara lain akibat dinamika ekonomi makro dan kehati-hatian investor dalam merealisasikan penanaman modal.

Kinerja indikator Jumlah Izin memperlihatkan lonjakan realisasi yang sangat signifikan, terutama pada tahun 2022 dan 2023 dengan rasio capaian masing-masing sebesar 823,07 persen dan 1.505,41 persen. Hal ini mencerminkan optimalisasi layanan perizinan berbasis sistem elektronik, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta adanya penyesuaian kebijakan yang mendorong percepatan proses perizinan. Pada tahun 2024, meskipun target meningkat tajam, realisasi tetap melampaui target dengan rasio

capaian 127,57 persen, menunjukkan kinerja pelayanan yang tetap responsif dan adaptif.

Sementara itu, indikator Peningkatan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA menunjukkan fluktuasi capaian yang cukup besar. Pada tahun 2021 hingga 2023, rasio capaian sangat tinggi, menandakan realisasi nilai investasi yang jauh melampaui target yang direncanakan. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan rasio capaian menjadi 35,37 persen, yang dipengaruhi oleh perlambatan realisasi investasi serta faktor eksternal yang memengaruhi iklim usaha. Adapun indikator Jumlah Aplikasi secara umum menunjukkan kesesuaian antara target dan realisasi, dengan rasio capaian mendekati atau melampaui 100 persen, mencerminkan konsistensi dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pendukung layanan serta tata kelola penanaman modal.

Tabel 2.11

Pencapaian Kinerja Pelayanan (Kegiatan) dari tahun 2021-2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	17	17	17	16	17	17	19	16	100,00	100,00	111,76	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	100	100	3	100	100	100	3	100,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan Administrasi Umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Perangkat daerah												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	10	10	10	100	10	10	10	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12	12	12	100	12	12	12	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara	108	108	108	100	108	108	108	100	100,00	100,00	100,00	100,00
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Menjadi Kewengan													
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ kota	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi	2	2	2	2	1	1	2	3	50,00	50,00	100,00	150,00
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	112	200	260	310	195	227	284	280	174,11	113,50	109,23	90,32

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizin secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM	87	87,12	87,75	91,96	90,04	91,35	91,96	92,91	103,49	104,86

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	370	370	370	300	370	370	370	427	100,00	100,00	100,00	142,33
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat	Aplikasi	1	15	3	3	1	14	4	3	100,00	93,33	133,33	100,00

Uraian Kinerja	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		Daerah Kabupaten/Kota											

Pada Tabel 2.11 untuk capaian kinerja pelayanan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama periode 2021–2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh target jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi dapat direalisasikan sesuai dengan rencana, bahkan pada tahun 2023 realisasi melampaui target dengan rasio capaian sebesar 111,76 persen. Kondisi ini mencerminkan konsistensi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, yang menjadi fondasi penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Pada aspek administrasi perangkat daerah, yang meliputi administrasi keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, serta administrasi umum, capaian kinerja secara konsisten mencapai 100 persen pada seluruh tahun pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi internal telah berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keberhasilan ini menjadi prasyarat utama dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik, sekaligus mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kinerja kegiatan pengadaan, penyediaan jasa, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah juga menunjukkan capaian optimal. Seluruh target pengadaan barang, laporan jasa penunjang, serta unit barang milik daerah yang dipelihara dapat direalisasikan 100 persen pada setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa dukungan sarana dan prasarana pelayanan telah dikelola secara efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Dalam rangka pengembangan iklim investasi, kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal telah dilaksanakan secara konsisten dengan capaian 100 persen pada seluruh periode. Sementara itu, kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota menunjukkan peningkatan kinerja pada tahun 2023 dan 2024, dengan rasio capaian masing-masing sebesar 100 persen dan 150 persen. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 capaian masih berada di bawah target, peningkatan ini mencerminkan penguatan upaya identifikasi dan pemetaan potensi investasi daerah sebagai dasar perumusan kebijakan promosi penanaman modal yang lebih terarah.

Capaian kinerja pelayanan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu

satu pintu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Jumlah investor PMDN/PMA pada sebagian besar tahun melampaui target, meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan rasio capaian menjadi 90,32 persen akibat dinamika ekonomi dan kehati-hatian investor. Sementara itu, tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara konsisten melampaui target dengan rasio capaian di atas 100 persen, yang mencerminkan kualitas pelayanan perizinan yang semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kinerja tersebut diperkuat oleh kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengelolaan data serta informasi perizinan yang seluruhnya mencapai atau melampaui target, menegaskan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan berbasis data dan sistem terintegrasi.

Adapun faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja :

1. Adanya embrio *networking* dengan *stakeholder* yang dapat menjadi daya ungkit keberhasilan program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadikan pelayanan terpadu satu pintu yang efektif bagi masyarakat;
3. Masih terjaganya kepercayaan dan minat penanam modal untuk berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Masih kuatnya sektor unggulan yaitu Pertambangan dan Perkebunan menjadi daya tarik penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Peningkatan kualitas pegawai melalui bimtek, *workshop-workshop* dan pendidikan kilat teknis terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan;
6. Meningkatnya komitmen pelaku usaha untuk melakukan pelaporan LKPM.
7. Iklim Investasi yang kondusif dan semakin solidnya kolaborasi antara DPMPSTP di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan provinsi dan *stakeholder* terkait.
8. Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha besar dengan UMKM;
9. Pembangunan strategis nasional yang memberikan dampak ketertarikan investor melakukan penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Faktor penghambat realisasi pencapaian kinerja:

1. Masih adanya permasalahan klasik, yaitu belum meratanya pertumbuhan investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), terutama di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyisakan permasalahan-permasalahan seperti permasalahan penyerapan tenaga kerja lokal;
2. Masih adanya perusahaan baik PMA maupun PMDN yang belum melaporkan LKPM secara rutin;
3. Belum optimalnya pemenuhan komitmen perizinan usaha oleh para pemohon izin;
4. Belum adanya peluang investasi yang *clean and clear* dan layak jual di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat dijadikan fokus utama promosi investasi;
5. Belum optimalnya implementasi regulasi penanaman modal untuk mendorong peningkatan kualitas iklim investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Ketersediaan lahan untuk berinvestasi terbatas serta sulitnya menemukan luasan lahan minimal dan berada dalam satu hamparan, harga lahan mentah yang relatif sudah mahal;
7. Kendala status tanah dimana hamparan lahan yang luas seringkali berbenturan dengan tanah milik adat, dimana izin pengelolaannya dirasa terlalu panjang bagi investor;
8. Belum adanya Kawasan Industri di Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Belum tersedianya dokumen RDTR di seluruh kabupaten Kutai Kartanegara sebagai basis OSS RBA memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menyimpan potensi masalah cukup besar untuk terjadinya tumpang tindih keruangan yang pada beberapa kasus berpotensi merugikan pelaku usaha.

2.1.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah.

Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara baik dalam

lingkup regional, nasional maupun internasional. Hasil identifikasi peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Tantangan (*Threats*) yakni:

1. Pertumbuhan investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) lima tahun terakhir tumbuh positif namun ternyata kurang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.
2. Penyebaran investasi yang tidak merata / ketimpangan investasi.
3. Keterbatasan informasi produk –produk investasi yang datanya sesuai realitas.
4. Proses perizinan bagi perusahaan PMA yang harus dikeluarkan pusat.
5. Intensitas penciptaan daya saing pada promosi dan penanaman modal oleh kabupaten/kota lain dan negara lain.
6. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur pelayanan perizinan dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan administrasi perizinan.
7. Perubahan mendasar pada pola bisnis pelaku usaha di era Revolusi Industri 5.0 yang didominasi milenial yang memiliki karakter tersendiri: *free-thinking*, berbasis kecepatan proses, *fully digitalized*, *banishing beaurecracy*, dan sebagainya.
8. Ketersediaan lahan yang sesuai dengan kriteria dan status kepemilikan tanah.

b. Peluang (*Opportunities*) yakni:

1. Komitmen pemerintah untuk mendorong investasi yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
2. Masih terjaganya kepercayaan dan minat penanam modal untuk berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Keberadaan asosiasi/forum pengusaha/institusi terkait sebagai mitra strategis untuk pengembangan penanaman modal;
4. Potensi *networking* yang kuat antar *stakeholder* yang dapat menjadi modal peningkatan iklim investasi. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara otonomi melakukan kebijakan kerjasama dengan pihak lain;
5. Adanya Proyek baru yang potensial menjadi pengungkit tumbuhnya aktivitas ekonomi dan investasi baru yaitu Ibu Kota Nusantara;

7. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk komitmen untuk mendorong transparansi dan percepatan pelaksanaan pelayanan secara terpadu;
8. Dengan adanya UU Cipta kerja dan peraturan turunannya dan implementasi OSS RBA maka diharapkan iklim penanaman modal serta *level Ease of Doing Business* menjadi meningkat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup berbagai pihak yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap proses perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kelompok ini terdiri dari pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro, baik yang berasal dari dalam daerah maupun luar daerah, serta investor asing (PMA) dan investor domestik (PMDN) yang tertarik untuk menanamkan modal di sektor-sektor potensial Kutai Kartanegara.

Selain itu, sasaran layanan juga meliputi individu atau masyarakat umum yang mengajukan izin tertentu, seperti izin mendirikan bangunan (IMB/PBG), izin reklame, maupun perizinan usaha lainnya. Lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi kemasyarakatan, serta instansi pemerintah daerah maupun pusat juga termasuk dalam cakupan sasaran layanan DPMPTSP, khususnya dalam hal konsultasi regulasi, fasilitasi perizinan, dan koordinasi lintas sektor. Tak kalah penting, kelompok aparatur internal DPMPTSP serta perangkat daerah terkait juga menjadi sasaran tidak langsung dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan dan integrasi sistem pelayanan, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel.

Dengan pendekatan inklusif ini, DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada seluruh *stakeholder* investasi dan perizinan, sejalan dengan prinsip *good governance* dan pelayanan publik berbasis digital.

2.1.4.1 Mitra Pendukung Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak dapat bekerja sendiri dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Sebagai instansi yang bertugas mengkoordinasikan perizinan serta memfasilitasi investasi, DPMPTSP membutuhkan dukungan teknis, rekomendasi, dan pertimbangan dari

berbagai perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sinergi antar dinas ini penting agar proses perizinan berjalan cepat, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (DPPR) berperan penting dalam memberikan rekomendasi teknis terkait infrastruktur, tata ruang, dan perencanaan wilayah. Misalnya, dalam penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), DPMPTSP harus mendapatkan pertimbangan dari dinas teknis ini agar perizinan sesuai dengan tata ruang serta aspek keamanan konstruksi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman (DISPERKIM) juga menjadi mitra dalam aspek perizinan yang menyangkut pemukiman rakyat, perencanaan perumahan, serta pemanfaatan lahan. Peran mereka sangat krusial untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh investor maupun masyarakat tetap sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, serta mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal.

Dinas Perhubungan (DISHUB) terlibat dalam aspek transportasi dan lalu lintas. Setiap investasi, khususnya yang berkaitan dengan industri dan kawasan perdagangan, memerlukan kajian mengenai aksesibilitas, dampak lalu lintas, serta kelayakan sarana transportasi. Rekomendasi dari DISHUB diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak menimbulkan masalah kemacetan maupun mengganggu keselamatan pengguna jalan.

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) semakin penting di era digital. Mitra ini mendukung DPMPTSP dalam penyediaan sistem informasi, pelayanan berbasis online, dan digitalisasi perizinan. Selain itu, DISKOMINFO juga membantu memperluas diseminasi informasi terkait peluang investasi serta layanan publik agar masyarakat dan investor mendapatkan akses informasi yang cepat dan transparan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) merupakan mitra strategis yang menangani aspek lingkungan. Setiap investasi atau pembangunan harus melalui kajian lingkungan, baik berupa dokumen UKL-UPL maupun AMDAL. DLHK berperan memberikan pertimbangan teknis agar kegiatan usaha tidak merusak lingkungan serta tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan konservasi sumber daya alam.

Bidang sektor riil juga didukung oleh dinas teknis lain seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan (Disbun), serta Dinas

Perikanan dan Kelautan. Perangkat daerah ini memberikan rekomendasi teknis terkait pemanfaatan lahan pertanian, peternakan, perkebunan, maupun kelautan. Hal ini penting untuk memastikan investasi tidak merusak potensi sektor primer, justru mampu mendukung produktivitas masyarakat lokal di bidang pangan dan agribisnis.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) berperan dalam aspek ketenagakerjaan. Mereka membantu DPMPTSP dalam memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan, serta melindungi hak-hak pekerja. Selain itu, Disnakertrans juga berperan dalam program pelatihan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha.

Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Diskluspora) juga menjadi mitra penting. Dinas Pariwisata mendukung pengembangan investasi berbasis wisata, Disperindag mendukung perdagangan dan pengembangan industri kecil menengah, sedangkan Diskluspora membantu mendorong potensi ekonomi kreatif dan kewirausahaan pemuda. Peran mereka melengkapi spektrum investasi non-ekstraktif yang bisa memperkuat ekonomi daerah.

Selain itu, Disdukcapil berperan menyediakan data kependudukan yang valid untuk mendukung proses administrasi layanan, DISPENDA mendukung sinkronisasi pendapatan daerah, sementara Dinas Koperasi dan UMKM menjadi mitra penting dalam pemberdayaan usaha kecil agar dapat bermitra dengan investor besar. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem investasi yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Adapun peran tiap mitra dapat dilihat pada tabel kolaborasi dibawah ini;

Tabel 2.12

Peran Mitra Perangkat Daerah

Mitra/Perangkat Daerah	Peran Utama	Relevansi terhadap Layanan DPMPTSP
Dinas Pekerjaan Umum (PU)	Memberikan rekomendasi teknis infrastruktur dan konstruksi	Mendukung izin pembangunan/investasi agar sesuai tata ruang dan standar konstruksi
Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (DPPR)	Pengelolaan tata ruang dan perumahan	Sinkronisasi izin PBG/IMB dengan kebijakan perumahan dan lahan
DISPERKIM	Perencanaan kawasan permukiman	Menjamin kesesuaian investasi dengan kebutuhan pemukiman berkelanjutan
DISHUB	Analisis dampak lalu lintas dan transportasi	Persyaratan izin usaha terkait aksesibilitas, parkir, dan keselamatan jalan
DISKOMINFO	Digitalisasi layanan dan sistem informasi	Mendukung OSS, SIMPADU, dan layanan online perizinan investasi
DLHK	Rekomendasi lingkungan (AMDAL, UKL-UPL)	Memastikan investasi ramah lingkungan dan sesuai aturan konservasi
Dinas Pertanian & Peternakan	Pertimbangan pemanfaatan lahan pangan	Mencegah alih fungsi lahan yang merugikan sektor pertanian lokal
Disbun (Perkebunan)	Rekomendasi pengelolaan lahan perkebunan	Mendukung investasi agribisnis berbasis perkebunan berkelanjutan
Dinas Perikanan & Kelautan	Pertimbangan pengelolaan perairan dan laut	Mendukung investasi perikanan tangkap, budidaya, dan industri hilir kelautan

Mitra/Perangkat Daerah	Peran Utama	Relevansi terhadap Layanan DPMPTSP
Disnakertrans	Aspek ketenagakerjaan & transmigrasi	Sinkronisasi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan investor
Dinas Pariwisata	Pengembangan destinasi & produk wisata	Mendukung investasi pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal
Disperindag	Regulasi perdagangan & industri	Mendukung izin usaha perdagangan, distribusi, dan industri kecil menengah
Diskluspora	Pengembangan ekonomi kreatif & pemuda	Mendukung investasi berbasis olahraga, UMKM kreatif, dan kewirausahaan pemuda
Disdukcapil	Validasi data kependudukan	Mendukung administrasi layanan berbasis NIK dalam perizinan
DISPENDA	Sinkronisasi pajak & retribusi daerah	Integrasi retribusi izin usaha dengan PAD daerah
Dinas Koperasi & UMKM	Pemberdayaan UMKM dan koperasi	Mendorong kolaborasi antara investor besar dan UMKM lokal

2.1.4.2 Dukungan BUMD dan BUMN dalam pencapaian kinerja

Perangkat daerah

Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat strategis dalam mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kehadiran mereka tidak hanya sebagai penyedia layanan pendukung, tetapi juga sebagai mitra sinergis dalam menciptakan ekosistem investasi yang kondusif. Melalui kolaborasi ini, investor dan pelaku usaha dapat memperoleh kepastian layanan yang lebih cepat, terpadu, dan efisien.

BUMD Titra Mahakam berperan dalam pengelolaan sumber daya air bersih dan sanitasi yang menjadi kebutuhan vital bagi kawasan industri, bisnis, maupun perumahan. Dukungan ini memastikan keberlanjutan suplai

air bagi investor yang menanamkan modalnya di Kukar. Sementara itu, Bankaltimtar sebagai bank daerah mendukung DPMPTSP dalam aspek permodalan, penyediaan kredit investasi, serta layanan perbankan bagi pelaku usaha lokal maupun investor, sekaligus memperkuat peran DPMPTSP dalam memfasilitasi kemudahan berusaha.

Di sisi lain, BUMN seperti BRI berkontribusi dalam penyediaan akses keuangan dan layanan perbankan yang luas, termasuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan misi DPMPTSP untuk memberdayakan UMKM lokal agar mampu bermitra dengan investor besar. PT PLN mendukung DPMPTSP melalui jaminan ketersediaan energi listrik, yang merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan investasi di sektor industri maupun jasa.

PT Telkom Indonesia hadir sebagai mitra strategis dalam mendukung digitalisasi layanan perizinan yang dikelola DPMPTSP. Ketersediaan jaringan telekomunikasi dan internet berkecepatan tinggi sangat krusial dalam memperkuat sistem perizinan online, promosi investasi digital, serta pengelolaan data investor. Dengan dukungan ini, DPMPTSP dapat mempercepat transformasi layanan publik menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan efisien.

Selain itu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berperan dalam mendukung perlindungan sosial tenaga kerja. Kehadiran mereka memastikan bahwa perusahaan yang berinvestasi di Kukar dapat memenuhi kewajiban jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pekerjanya. Hal ini meningkatkan daya tarik investasi, karena investor memperoleh kepastian dalam hal regulasi ketenagakerjaan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan sinergi BUMD dan BUMN tersebut, DPMPTSP semakin kuat dalam menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun peran BUMD dan BUMN dalam pencapaian target kinerja DPMPTSP dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel. 2.13

Tabel Peran BUMD dan BUMN dalam Pencapaian target kinerja DPMPTSP

Lembaga	Kategori	Peran Utama	Dukungan terhadap DPMPTSP
Titra Mahakam	BUMD	Penyedia air bersih dan sanitasi	Menjamin ketersediaan air

Lembaga	Kategori	Peran Utama	Dukungan terhadap DPMPSTP
			untuk kawasan industri, perumahan, dan investasi; mendukung keberlanjutan infrastruktur dasar bagi investor.
Bankaltimtara	BUMD	Layanan perbankan daerah & pembiayaan	Memberikan akses kredit investasi, fasilitas modal kerja, dan layanan keuangan untuk UMKM lokal dan investor.
BRI	BUMN	Layanan perbankan nasional & UMKM	Menyediakan pembiayaan inklusif bagi UMKM, memperluas akses permodalan, dan memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha.
PT PLN	BUMN	Penyedia energi listrik	Menjamin ketersediaan energi bagi kawasan industri, perdagangan, dan layanan publik; mendukung kepastian pasokan listrik untuk investasi.

Lembaga	Kategori	Peran Utama	Dukungan terhadap DPMPSTP
PT Telkom Indonesia	BUMN	Telekomunikasi & digitalisasi	Menyediakan infrastruktur jaringan internet dan teknologi informasi untuk mendukung layanan perizinan online dan promosi investasi digital.
BPJS Kesehatan	BUMN	Perlindungan jaminan kesehatan tenaga kerja	Mendukung kepastian perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja di perusahaan/investor sesuai regulasi.
BPJS Ketenagakerjaan	BUMN	Perlindungan sosial ketenagakerjaan	Menjamin hak pekerja dalam aspek jaminan sosial, keselamatan, dan kesejahteraan tenaga kerja; meningkatkan kepercayaan investor.

2.1.4.3 Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah

Kerja sama daerah dengan berbagai instansi pusat maupun lembaga vertikal menjadi bagian penting dalam mewujudkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terintegrasi. DPMPSTP sebagai leading sector tidak hanya menghadirkan layanan perizinan daerah, tetapi juga mengintegrasikan layanan lintas instansi melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini bertujuan untuk

menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, dan inklusif bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Salah satu bentuk kerja sama strategis adalah dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kepolisian. Kehadiran layanan hukum, administrasi, dan keamanan di MPP memberi kemudahan masyarakat dalam mengurus dokumen legalitas usaha, izin tertentu, serta kebutuhan administrasi kepolisian seperti SKCK. Kerja sama dengan Imigrasi juga penting, terutama dalam pelayanan paspor, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya, sehingga masyarakat dan investor tidak perlu lagi ke kantor pusat di luar daerah.

Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan SAMSAT juga menjadi bagian integral dalam mendukung ekosistem perizinan dan investasi. Layanan perpajakan yang tersedia di MPP memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sedangkan layanan SAMSAT mempermudah masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan bermotor. Integrasi ini memperlihatkan komitmen pemerintah daerah menghadirkan layanan publik yang efisien dan ramah masyarakat.

Selain itu, layanan perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan juga hadir melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta PT Taspen. Hal ini memastikan bahwa masyarakat, tenaga kerja, hingga aparatur sipil negara mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang memadai. Kerja sama dengan KUA dan Departemen Agama pun memberikan nilai tambah, karena masyarakat dapat mengakses layanan pencatatan pernikahan, konsultasi keagamaan, hingga pelayanan administratif keagamaan secara langsung di MPP.

Melalui berbagai MoU tersebut, Mal Pelayanan Publik di Kutai Kartanegara hadir sebagai simbol pelayanan inklusif yang mengintegrasikan urusan daerah, nasional, hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari dalam satu tempat. Sinergi ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus mendukung iklim investasi yang lebih kondusif dengan kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta perlindungan sosial yang menyeluruh.

2.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Investasi salah satu memegang peranan penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan pembangunan suatu wilayah. Mendorong tumbuhnya investasi merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi wilayah yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan investasi wilayah bukan hanya tanggung jawab satu dua pihak, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama semua komponen masyarakat. Sifatnya yang multisektor mengharuskan adanya kolaborasi, sinergi langkah dan strategi dari seluruh *stakeholder*.

Pemerintah yang merupakan institusi pengambil kebijakan publik, sebagai penentu aturan main tentunya harus memiliki peran besar dalam pengembangan investasi wilayah yang terarah, fokus serta bertujuan memastikan kemanfaatan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Apabila pemerintah menyerahkan pengembangan investasi ini pada mekanisme pasar maka kemanfaatan investasi hanya akan dinikmati kalangan tertentu saja. Bertolak dari hal tersebut maka peran aktif pemerintah sangat diperlukan. Dalam kerangka tersebut maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya dan bertujuan untuk terus mendorong beberapa hal diantaranya:

1. Terciptanya regulasi yang mampu mempromosikan *competitive investment climate* dan menciptakan beragam peluang investasi;
2. Konsolidasi dan sinergi dengan pihak lain;
3. Adanya kesamaan cara pandang apa yang baik untuk pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara khususnya investasi;
4. Ketersediaan database yang berkualitas untuk mendukung proses *mapping* baik itu untuk pelaku usaha maupun potensi wilayah yang ada yang bertujuan untuk menentukan arah pengembangan investasi;
5. Analisis kesesuaian antara investor dengan potensi Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang merupakan ujung tombak untuk meningkatkan daya saing dalam hal menarik investasi.

2.2.1.1 Isu Permasalahan Investasi: Nasional dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini selain sedang berhadapan dengan permasalahan bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi juga dihadapkan pada permasalahan belum adanya kawasan industri (KI) yang dapat dikembangkan untuk menarik minat Pengusaha atau investor. Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang besar yang ada seperti adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemampuan untuk mengenali potensi serta mendorongnya menuju titik optimal serta memetakan permasalahan dan kelemahan yang ada dan dapat merumuskan solusi untuk mengatasinya merupakan sebuah keharusan dalam merumuskan rencana strategis yang dapat diaplikasikan (*applicable*). Di sisi lain, Kabupaten Kutai Kartanegara kini juga tengah berada di dalam perubahan besar *trend* perekonomian dunia yang dipicu oleh Revolusi Industri 5.0 dimana teknologi dan digitalisasi menjadi landasan perubahan perilaku bisnis di dunia. Sebagian besar permasalahan investasi yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara apabila dirunut juga merupakan turunan dari permasalahan investasi yang dihadapi Indonesia di tingkat nasional. Salah satu permasalahan Indonesia saat ini adalah realisasi investasi yang tinggi tetapi kurang berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang juga rendah. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya hambatan investasi di Indonesia yang perlu diurai satu persatu agar iklim investasi Indonesia dapat ditingkatkan. Selain permasalahan tersebut, terdapat fakta permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu kesenjangan antara rencana investasi yang telah disetujui dengan investasi yang benar benar direalisasikan. Hambatan investasi yang ada di tingkat nasional dan daerah cukup seragam dan juga luas, mulai dari persoalan aturan, lahan, birokrasi, tenaga kerja dan lain-lain menjadikan rencana investasi kadang kala tidak berjalan dilapangan.

2.2.1.2 Isu Kebijakan Investasi: Kebijakan Pemerintahan RI

Pergantian pimpinan negara maupun pimpinan kementerian pusat sedikit banyak akan mengubah arah kebijakan kementerian investasi yang akan menjadi salah satu landasan arah kebijakan Pemerintah Daerah terkait urusan perizinan dan penanaman modal. Secara garis besar kebijakan pusat yaitu mengejar nilai realisasi investasi dengan titik beratnya pada investasi

yang berkualitas. Diharapkan investasi yang masuk tidak hanya dalam jumlah besar akan tetapi investasi haruslah benar-benara siap jual, menyerap lebih banyak tenaga kerja, bermitra dengan pengusaha lokal serta memberikan nilai tambah (*value added*) bagi perekonomian.

2.2.1.3 Identifikasi Permasalahan Perizinan dan Penanaman Modal

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada ruang lingkup perizinan dan penanaman modal diantaranya yaitu :

1. Belum adanya kepastian hukum terkait penetapan kawasan industri.

Salah satu isu strategis dalam upaya peningkatan investasi daerah adalah belum adanya kepastian hukum terkait penetapan kawasan industri. Permasalahan ini muncul karena hingga saat ini belum terdapat regulasi yang jelas, tegas, dan mengikat di tingkat daerah yang dapat menjadi dasar hukum penetapan kawasan industri. Akibatnya, terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian bagi investor dalam proses perolehan lahan maupun perizinan.

Kondisi tersebut diperparah oleh belum sinkronnya RTRW dan RDTR di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga penetapan lokasi kawasan industri tidak memiliki legitimasi tata ruang yang konsisten. Investor yang berencana menanamkan modal menghadapi hambatan serius karena status hukum kawasan belum jelas, sehingga menimbulkan keraguan dalam jangka panjang. Hal ini berdampak pada terhambatnya realisasi investasi, baik dari sisi kepastian lahan, prosedur perizinan, maupun aspek keberlanjutan regulasi.

Di sisi lain, belum adanya Perda atau peraturan turunan yang secara spesifik mengatur penetapan kawasan industri menjadi akar masalah utama. Regulasi yang ada masih bersifat umum, sementara kebutuhan daerah adalah regulasi yang operasional dan implementatif. Lemahnya koordinasi antar-instansi terkait (DPMPTSP, Bappeda, Dinas Perindustrian, Distaru) semakin memperlambat proses penetapan kawasan industri, karena masing-masing instansi berjalan dengan kewenangannya sendiri tanpa mekanisme koordinasi yang solid.

Selain itu, belum terbentuknya Satgas khusus kawasan industri juga memperburuk situasi. Akibatnya, tidak ada lembaga yang berfungsi sebagai koordinator lintas sektor untuk menyelesaikan hambatan perizinan, tata ruang, maupun penyediaan infrastruktur

dasar kawasan industri. Dampak langsungnya adalah ketidakpastian status hukum kawasan yang menyebabkan investor tidak memiliki jaminan regulasi maupun prosedural yang konsisten, sehingga proses akuisisi lahan dan perizinan menjadi berlarut-larut.

Lebih jauh, persoalan ini juga menimbulkan konflik kepentingan tata ruang dengan sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Tanpa adanya kejelasan hukum, potensi benturan antar sektor sulit dihindarkan. Padahal, investor pada dasarnya membutuhkan kepastian hukum jangka panjang yang dapat memberikan jaminan keberlanjutan investasi mereka.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam penetapan kawasan industri bukan hanya soal teknis administratif, melainkan lebih mendasar pada kekosongan regulasi daerah serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Tanpa adanya langkah konkret berupa penerbitan Perda/aturan turunan, pembentukan Satgas lintas instansi, dan sinkronisasi RTRW/RDTR, maka hambatan kepastian hukum kawasan industri akan terus berlanjut dan berimplikasi langsung pada rendahnya minat investasi di daerah.

2. Belum tersedianya dukungan regulasi tentang fasilitasi dan insentif kemudahan berusaha di Kutai Kartanegara

Salah satu kendala mendasar dalam upaya peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah belum tersedianya dukungan regulasi yang secara spesifik mengatur tentang fasilitasi dan pemberian insentif bagi pelaku usaha maupun investor. Ketiadaan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor dan pelaku usaha. Akibatnya, daya tarik investasi daerah menjadi rendah karena para calon investor lebih cenderung memilih wilayah yang memiliki instrumen regulasi yang jelas, tegas, dan implementatif walaupun saat ini sudah tersedia Peraturan Daerah nomor 02 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di daerah. Sementara di daerah lain telah tersedia aturan insentif serta fasilitasi usaha yang lebih ringkas. Perbedaan ini menciptakan kesenjangan daya saing antar daerah dan berimplikasi pada menurunnya minat investasi ke Kutai Kartanegara.

Permasalahan ini bersumber dari akar masalah berupa belum adanya regulasi daerah yang spesifik terkait fasilitasi dan insentif

kemudahan berusaha. Regulasi dari pemerintah pusat, meskipun sudah ada, belum diturunkan dalam aturan teknis di tingkat daerah, sehingga pelaksanaannya tidak dapat berjalan optimal. Selain itu, kurangnya sosialisasi kebijakan usaha kepada pelaku usaha lokal menambah kerumitan, karena banyak pihak belum memahami secara jelas hak dan fasilitas yang semestinya dapat mereka peroleh.

Lebih jauh, terdapat keterbatasan fiskal daerah yang menjadi kendala dalam penyediaan insentif fiskal maupun nonfiskal. Padahal, pemberian insentif menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya tarik investasi di tengah persaingan antar wilayah. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan kemudahan berusaha. DPMPTSP sebagai leading sektor sering kali tidak memiliki dukungan penuh dari perangkat daerah teknis lainnya.

Selain itu, belum adanya unit khusus yang menangani fasilitasi usaha secara terpadu membuat layanan kepada investor terfragmentasi dan tidak efisien. Hal ini berbanding terbalik dengan praktik di sejumlah daerah lain yang telah memiliki perangkat kelembagaan maupun unit khusus yang secara konsisten memberikan pendampingan, fasilitasi, hingga insentif kepada investor.

Dengan demikian, persoalan belum tersedianya regulasi tentang fasilitasi dan insentif kemudahan berusaha bukan hanya berdampak pada aspek legal formal, tetapi juga berimplikasi langsung pada rendahnya kepastian hukum, lemahnya daya saing investasi, panjangnya proses perizinan, dan minimnya dukungan kelembagaan. Tanpa adanya regulasi daerah yang kuat, dukungan fiskal, dan kelembagaan khusus, maka Kutai Kartanegara akan sulit bersaing dalam menarik investasi jangka panjang dan berkelanjutan.

3. Belum memadainya infrastruktur pendukung investasi pada kawasan yang diperuntukkan

Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan daya tarik investasi di daerah adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai pada kawasan yang telah diperuntukkan bagi kegiatan usaha dan industri. Namun, di Kabupaten Kutai Kartanegara masih terdapat kendala serius berupa belum memadainya infrastruktur pendukung investasi. Kondisi ini tercermin dari masih terbatasnya infrastruktur dasar, rendahnya aksesibilitas kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan industri

atau sentra industri, minimnya sarana pendukung, serta belum tersedianya fasilitas yang mampu menunjang aktivitas produksi, distribusi, maupun logistik secara optimal.

Keterbatasan infrastruktur tersebut berimplikasi langsung pada menurunnya daya saing kawasan investasi dibandingkan dengan daerah lain. Investor cenderung memilih lokasi dengan infrastruktur yang lebih siap, karena hal itu mengurangi biaya operasional dan risiko usaha. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan produksi, kawasan industri pengolahan, *cold storage*, hingga fasilitas logistik membuat kawasan investasi di Kutai Kartanegara sulit berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

Permasalahan ini semakin kompleks karena RTRW daerah belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung investasi. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan infrastruktur mengakibatkan banyak proyek tidak selaras dengan kebutuhan riil kawasan industri maupun sentra ekonomi. Bahkan, proyek infrastruktur yang ada sering mengalami keterlambatan, sehingga manfaatnya bagi dunia usaha tidak segera dirasakan.

Di sisi lain, arah kebijakan pembangunan masih lebih banyak fokus pada infrastruktur umum seperti jalan kota atau fasilitas publik, sementara infrastruktur spesifik penunjang investasi belum menjadi prioritas utama. Situasi ini diperparah oleh kurangnya partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pembangunan infrastruktur, sehingga kebutuhan sektor riil sering kali tidak terakomodasi dengan baik.

Akar masalah lainnya adalah belum adanya skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau alternatif pembiayaan lain yang dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Keterbatasan fiskal daerah membuat pembangunan infrastruktur strategis sulit dipenuhi hanya dengan mengandalkan APBD. Tanpa skema pembiayaan alternatif, percepatan pembangunan infrastruktur kawasan akan terus terhambat.

Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah masih lemah, sehingga perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur berjalan sektoral dan tidak terpadu. Hal ini berbeda dengan daerah lain yang relatif lebih siap dalam menyiapkan infrastruktur pendukung investasi,

baik melalui regulasi insentif maupun kemitraan strategis dengan pihak swasta. Di Kutai Kartanegara, belum ada regulasi yang memberikan insentif bagi swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, padahal peran swasta sangat penting dalam mempercepat penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan demikian, permasalahan belum memadainya infrastruktur pendukung investasi pada kawasan yang diperuntukkan bukan sekadar kendala teknis, melainkan juga menyangkut sinkronisasi kebijakan tata ruang, keterbatasan fiskal, lemahnya koordinasi kelembagaan, dan absennya regulasi insentif. Tanpa adanya solusi komprehensif berupa integrasi RTRW dan rencana infrastruktur, percepatan KPBU, penguatan koordinasi lintas instansi, serta penyediaan insentif bagi swasta, maka daya saing investasi Kutai Kartanegara akan terus tertinggal dibanding daerah lain yang infrastrukturnya sudah lebih siap.

4. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal dan potensi hilirisasi pertanian dalam arti luas

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya lokal yang melimpah, khususnya di sektor pertanian dalam arti luas, meliputi subsektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga kehutanan rakyat. Namun, potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong nilai tambah ekonomi daerah. Produk pertanian masih banyak dijual dalam bentuk mentah, tanpa melalui proses pengolahan yang dapat meningkatkan nilai jual, daya saing, serta kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya investasi pada sektor pengolahan hasil pertanian (hilirisasi). Investor cenderung kurang berminat menanamkan modal di bidang ini karena keterbatasan fasilitas insentif dan kemudahan berusaha yang disediakan daerah. Akibatnya, sektor hilir pertanian tidak berkembang secara signifikan, yang berdampak pada serapan tenaga kerja yang minim dan serta pendapatan daerah yang kurang optimal. Lebih jauh, pola penjualan bahan mentah membuat daerah sangat bergantung pada pasar luar, sehingga posisi tawar petani dan pelaku usaha lokal menjadi lemah.

Akar masalah dari kondisi ini adalah belum adanya kebijakan daerah yang secara spesifik yang mendorong investasi hilirisasi

pertanian. Regulasi yang ada masih bersifat umum, sementara kebutuhan sektor hilir adalah kebijakan yang operasional, seperti insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Hingga kini, kawasan agroindustri belum terbentuk, sehingga tidak ada pusat pengolahan dan distribusi yang terintegrasi. Padahal, kawasan agroindustri dapat menjadi motor penggerak hilirisasi pertanian secara kolektif dan berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung pemberian insentif maupun kemudahan berusaha bagi sektor pertanian hilir belum optimal. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, minat investor semakin rendah. Situasi ini diperparah dengan belum terbentuknya kelembagaan usaha yang kuat, baik koperasi maupun asosiasi pelaku usaha pertanian, yang seharusnya mampu memperkuat posisi petani dan UMKM dalam rantai nilai pertanian.

Keterbatasan investasi sektor hilir juga erat kaitannya dengan sulitnya akses pembiayaan. Pelaku usaha kecil dan menengah di sektor pertanian sering kali kesulitan memperoleh kredit usaha, sementara skema pembiayaan alternatif masih terbatas. Hal ini membuat kegiatan pengolahan dan pengembangan produk pertanian bernilai tambah sulit berkembang.

Di sisi lain, pasar dan distribusi produk pertanian belum berjalan secara efisien. Kurangnya fasilitas logistik dan *cold storage* menyebabkan produk mudah rusak, biaya distribusi tinggi, dan daya saing produk melemah. Kondisi ini semakin mengurangi daya tarik sektor hilir pertanian di mata investor. Tanpa adanya insentif yang menarik, minat investor untuk masuk ke sektor hilirisasi pertanian di Kutai Kartanegara akan tetap rendah.

Dengan demikian, permasalahan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal dan potensi hilirisasi pertanian bukan hanya menyangkut aspek produksi, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, regulasi, infrastruktur, akses pembiayaan, serta mekanisme distribusi dan pasar. Tanpa adanya kebijakan daerah yang tegas, pembentukan kawasan agroindustri, dukungan logistik yang memadai, dan insentif yang menarik bagi investor, maka sektor hilir pertanian di Kutai Kartanegara akan terus tertinggal, padahal potensinya sangat besar untuk menjadi pilar utama perekonomian daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.14 Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum adanya kepastian hukum terkait penetapan kawasan industri	Tidak adanya regulasi yang jelas dan mengikat mengenai penetapan kawasan industri di tingkat daerah	Belum adanya perda atau peraturan turunan yang secara spesifik mengatur penetapan kawasan industri.
	Tumpang Tindih kewenangan Pusat dan daerah	Koordinasi antar-instansi (DPMPTSP, Bappeda, Dinas Perindustrian, Distaru) belum optimal.
		Belum adanya satgas khusus kawasan industri
	Investor menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh lahan dan perizinan karena status hukum kawasan belum jelas.	ketidakpastian status hukum kawasan yang menyebabkan proses perolehan lahan dan perizinan bagi investor tidak memiliki kepastian regulasi dan prosedural.
	RTRW/RDTR yang belum sinkron	konflik kepentingan tata ruang (sektor lain)
Belum tersedianya dukungan regulasi	Belum ada Perda/perbup	Belum ada regulasi daerah spesifik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
tentang fasilitasi dan insentif kemudahan berusaha di Kutai Kartanegara	insentif berusaha	aturan pusat belum diturunkan dalam aturan teknis daerah
	Investor dan pelaku usaha tidak mendapat kepastian	kurang sosialisasi kebijakan usaha
	daya tarik investasi rendah	Daerah lain sudah punya insentif
	UMKM tidak dapat dukungan jelas	Keterbatasan fiskal daerah
	Mekanisme perizinan masih relatif panjang dan berlapis	Koordinasi antar perangkat daerah lemah tidak ada unit khusus fasilitasi usaha
Belum memadainya infrastruktur pendukung investasi pada kawasan yang diperuntukkan	Infrastruktur dasar terbatas	RTRW belum mengakomodasi kebutuhan infrastruktur
	Aksesibilitas kawasan rendah	Belum sinkron dengan rencana pembangunan infrastruktur
		Proyek infrastruktur sering terlambat
	sarana pendukung minim	Fokus kebijakan pada infrastruktur umum
		Kurangnya partisipasi dunia usaha dan masyarakat
Belum memadainya infrastruktur pendukung investasi pada kawasan yang diperuntukkan	Belum ada skema KPBU/alternatif pembiayaan (Ketersediaan infrastruktur penunjang (jalan produksi, kawasan industri pengolahan, cold storage, logistik) masih terbatas.	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Koordinasi antar perangkat daerah lemah	
	daya saing kawasan menurun	daerah lain lebih siap infrastrukturnya	
		belum adanya regulasi insentif bagi swasta yang membangun infrastruktur	
Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal dan potensi hilirisasi pertanian dalam arti luas	Produk masih dijual mentah	kebijakan daerah yang secara spesifik mendorong investasi hilirisasi pertanian.	
	Terbatasnya investasi pada sektor pengolahan hasil pertanian	belum adanya kawasan agroindustri	
	Keterbatasan fasilitas insentif dan kemudahan berusaha untuk sektor pertanian hilir	belum optimalnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pemberian insentif serta kemudahan berusaha bagi sektor pertanian hilir.	
	Promosi investasi kawasan industri belum efektif	Belum tersedianya kawasan industri	
	Masih terbatasnya peta potensi investasi	Belum lengkapnya data potensi investasi dan potensi unggulan	
	Serapan tenaga kerja minim		Belum terbentuk kelembagaan usaha yang kuat
			Keterbatasan investasi sektor hilirisasi
		Akses pembiayaan sulit	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Pendapatan dan PAD kurang optimal	pasar dan Distribusi belum efisien
	ketergantungan pasar luar tinggi	Kurangnya fasilitas logistik dan cold storage
		Minat investor rendah tanpa insentif

2.2.1.4 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui visi “Kukar Idaman Terbaik” menargetkan transformasi daerah berbasis tiga pilar utama: pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya misi pembangunan melalui fungsi investasi dan pelayanan publik yang terintegrasi.

Adapun peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mewujudkan misi kepala daerah terpilih tahun 2025-2029 yaitu pada Misi kedua Kukar Idaman Terbaik, yaitu hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, selaras langsung dengan tugas DPMPTSP. Percepatan investasi pada sektor-sektor ini memerlukan penyediaan data potensi investasi, fasilitasi investor, dan penyederhanaan perizinan usaha. DPMPTSP dapat mendorong pelaksanaan *Program Kawasan Ekonomi Sejahtera* melalui penetapan kawasan prioritas investasi, dukungan kemudahan berusaha (*Easy of Doing Business*), dan penyusunan promosi investasi tematik (seperti: Investasi Hijau di wilayah Ulu, Pariwisata Agro Kutai Tengah, Hilirisasi sektor non ekstraktif (*Refinery*) di wilayah pantai dll).

Dan juga pada Misi ketiga yakni tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme ASN, DPMPTSP juga harus memastikan standar pelayanan publik terus meningkat melalui digitalisasi, integrasi sistem informasi, serta pengembangan Mal Pelayanan Publik. Program “Pelayanan Publik Cerdas” membuka peluang bagi DPMPTSP menjadi penggerak *smart governance* di tingkat daerah. Transformasi tata kelola layanan akan memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperluas basis investasi.

Sejalan dengan misi ketiga tersebut DPMPTSP mendorong untuk mempercepat transformasi digital layanan publik melalui *Mal Pelayanan Publik Cerdas*, penggunaan OSS-RBA, dan penguatan sistem digital serta integrasi sistem perizinan dengan data kependudukan. Ini akan menciptakan pelayanan publik yang adaptif, cepat, dan transparan.

Melalui sinergi lintas program, DPMPTSP berperan penting dalam menggerakkan investasi produktif yang mendukung transformasi ekonomi daerah. Sebagai lembaga *frontline* dalam interaksi dengan pelaku usaha dan investor, DPMPTSP harus menyesuaikan strategi kebijakannya dengan arah pembangunan berkelanjutan, pro-rakyat, dan berbasis kearifan lokal yang menjadi dasar semangat Kukar Idaman Terbaik.

2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Merencanakan pengembangan penanaman modal tidak lepas dari merencanakan ruang yang layak untuk investasi. Investasi selalu membutuhkan ruang tersendiri, meskipun luasan lahan yang diperlukan berbeda untuk setiap jenis investasi yang ada. Salah satu kendala pengembangan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah belum adanya peraturan pemerintah terkait kawasan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menata investasi harus sejalan dari menata ruang. Semua proses kehidupan membutuhkan ruang. Pembagian ruang secara proporsional merupakan hal yang sangat diperlukan agar terjadi keseimbangan antara proses ekonomi, sosial dan serta kepentingan menjaga lingkungan.

Untuk merencanakan pengembangan investasi maka perlu dipertimbangkan berbagai ketentuan peraturan perundangan yang secara khusus mengatur tentang keruangan, dimulai dari Rencana Ruang Nasional hingga Rencana Tata Ruang Wilayah hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Rencana-rencana kawasan strategis yang ditentukan mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga turut menjadi pertimbangan.

Kesesuaian pola dan struktur ruang dalam pengembangan investasi merupakan hal yang sangat penting demi tercapainya dan keberlangsungan rencana pengembangan investasi yang telah disusun. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu pula telah ditentukan beberapa titik/pusat pertumbuhan/maupun potensi yang akan dijadikan lokus/pusat pengembangan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam beberapa

tahun ke depan. Pada Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042 dimana sudah ditetapkan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat di Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Marang kayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Sanga-sanga, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang seluas 10.662 ha (sepuluh ribu enam ratus enam puluh dua hektare). Akan tetapi Peraturan Daerah ini hanya sebatas kawasan peruntukan industri bukan sebagai Kawasan Industri.

2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Hasil penentuan isu-isu strategis yang ditinjau dari identifikasi permasalahan, pengamatan terhadap isu/trend dunia usaha serta telaah pada sasaran jangka menengah pada Renstra K/L telah diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Renstra Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yaitu :

1. Perlunya penyusunan Perda/Perbup tentang kawasan industri.
2. Arah Investasi ke Sektor Berkelanjutan (*Green Investment & Non-Ekstraktif*).
3. Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan dan Non-Perizinan
4. Pengembangan Sistem Informasi & Digitalisasi Promosi Investasi
5. Ketersediaan dan validitas data peta potensi investasi

Berkembangnya potensi ekonomi baru Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di bidang industri Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata serta ekonomi kreatif. Adapun penyimpulan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tabel 2.15 dibawah ini

Tabel 2.15 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Relevan dengan RTRW	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD				Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemerintah Daerah mendorong program hilirisasi komoditas unggulan dengan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dekat sumber bahan baku	<ol style="list-style-type: none"> Promosi investasi kawasan industri belum efektif Belum adanya kepastian hukum terkait penetapan kawasan industri. 	<ol style="list-style-type: none"> Kualitas dan ketersediaan data daya dukung-tampung lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi berupa kawasan peruntukkan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara; Pengembangan kawasan industri dengan strategi meliputi pengembangan sektor hilirisasi industri 	<ol style="list-style-type: none"> Geopolitik Dan Geoekonomi Trend Global Green Investment & Sustainability (Industi Hijau & Berkelanjutan) 	<ol style="list-style-type: none"> Implementasi UU Cipta Kerja & Peraturan Turunannya Arah Kebijakan Nasional Hilirisasi & Industrialisasi Resiliensi Dan Prospek Perekonomian Yang Positif 	<ol style="list-style-type: none"> Diversifikasi Ekonomi ke Sektor Non-Ekstraktif Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan ekonomi berbasis sektor ekonomi non ekstraktif 	<ol style="list-style-type: none"> Kepastian hukum kawasan industri/investasi Arah Investasi ke Sektor Berkelanjutan (<i>Green & Non-Ekstraktif</i>)

Potensi Daerah Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Relevan dengan RTRW	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD				Isu Strategis Perangkat Daerah
				Global	Nasional	Regional	Daerah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Fasilitasi Perizinan dan Kemudahan Berusaha	1. Belum tersedianya regulasi daerah tentang fasilitasi dan insentif usaha 2. Koordinasi antar perangkat daerah belum maksimal	Kepastian Tata Ruang dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan		Perkembangan Teknologi melalui Digitalisasi Promosi Investasi	Implementasi OSS & Integrasi Data Perizinan	Keterbatasan infrastruktur digital layanan perizinan		1. Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan dan Non-Perizinan 2. Pengembangan Sistem Informasi & Digitalisasi Promosi Investasi
Pemetaan & Penyediaan Data Potensi Investasi	Belum tersedianya Peta Potensi di seluruh kecamatan	Keterbatasan data daya dukung–daya tampung lingkungan		keterbukaan data investasi (open data, good governance	arah kebijakan hilirisasi & perwilayahan industri (RUPM/RPJ MN)	Ketimpangan antar kecamatan		Ketersediaan dan validitas data peta potensi investasi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 diarahkan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Tujuan ini selaras dengan sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya investasi daerah, yang dipandang sebagai salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah.

Indikator utama dalam mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN/PMA (persentase). Kondisi dasar (baseline) pada tahun 2025 triwulan III menunjukkan angka -29,18 persen, yang merefleksikan terjadinya kontraksi realisasi investasi akibat perlambatan ekonomi dan dinamika eksternal yang memengaruhi iklim usaha. Kondisi ini menjadi tantangan awal yang harus direspons melalui kebijakan yang adaptif, terarah, dan berbasis pada penguatan pelayanan penanaman modal serta perbaikan ekosistem investasi daerah.

Sejalan dengan kondisi baseline tersebut, target pertumbuhan realisasi investasi pada periode 2025–2029 ditetapkan secara bertahap dan realistis. Pada tahun 2025 ditargetkan terjadi stabilisasi dengan pertumbuhan sebesar 0 persen, sebagai fase pemulihan awal. Selanjutnya, target pertumbuhan ditingkatkan secara progresif pada tahun 2026 sebesar 0,8 persen, tahun 2027 sebesar 1,0 persen, tahun 2028 sebesar 1,10 persen, dan tahun 2029 sebesar 1,15 persen, hingga mencapai 1,20 persen pada tahun 2030. Pola penetapan target ini mencerminkan strategi pemulihan dan akselerasi investasi yang berkesinambungan.

Pencapaian tujuan tersebut akan didukung melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, penguatan promosi investasi, penyediaan data dan informasi potensi investasi yang akurat, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang efektif. Dengan demikian, Renstra DPMPTSP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong peningkatan investasi daerah secara berkelanjutan dan berorientasi pada

hasil pembangunan yang nyata. Berpijak dari Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah, berikut disajikan tujuan Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatkan Penanaman Modal di Kutai Kartanegara		Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (%)	-29,18	0	0,8	1	1,10	1,15	1,20	

Keterangan:

1. Kenaikan rata-rata pertahun 0,24 point
2. Base line adalah tahun 2025 triwulan III dengan perhitungan target pertriwulan dari tahun 2020 triwulan I sampai 2025 triwulan III.
3. Formula perhitungan Output menggunakan Rumus sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2017

$$I = (\text{Nilai Tahun } n - \text{Nilai Tahun } n-1) / \text{Nilai Tahun } n-1 \times 100\%$$

Dimana:

I = Pertumbuhan Investasi

Nilai Tahun n = Nilai Investasi atau pendapatan pada periode Tahun Berjalan

Nilai Tahun n-1 = Nilai Investasi atau pendapatan pada Periode Tahun Lalu

Penetapan target pertumbuhan realisasi investasi PMDN/PMA dalam Renstra DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan bertahap dan realistis, dengan mempertimbangkan kondisi dasar tahun 2024 yang menunjukkan kontraksi sebesar -29,18 persen. Oleh karena itu, pada tahun 2025 ditetapkan target pertumbuhan sebesar 0 persen sebagai fase stabilisasi dan pemulihan awal. Pada tahap ini, kebijakan difokuskan pada pemulihan kepercayaan investor, perbaikan iklim usaha, serta penguatan kualitas pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal.

Selanjutnya, pada tahun 2026 target pertumbuhan ditingkatkan sebesar 0,8 poin persentase, yang mencerminkan awal fase akselerasi investasi setelah stabilisasi tercapai. Pada tahun 2027, kenaikan target

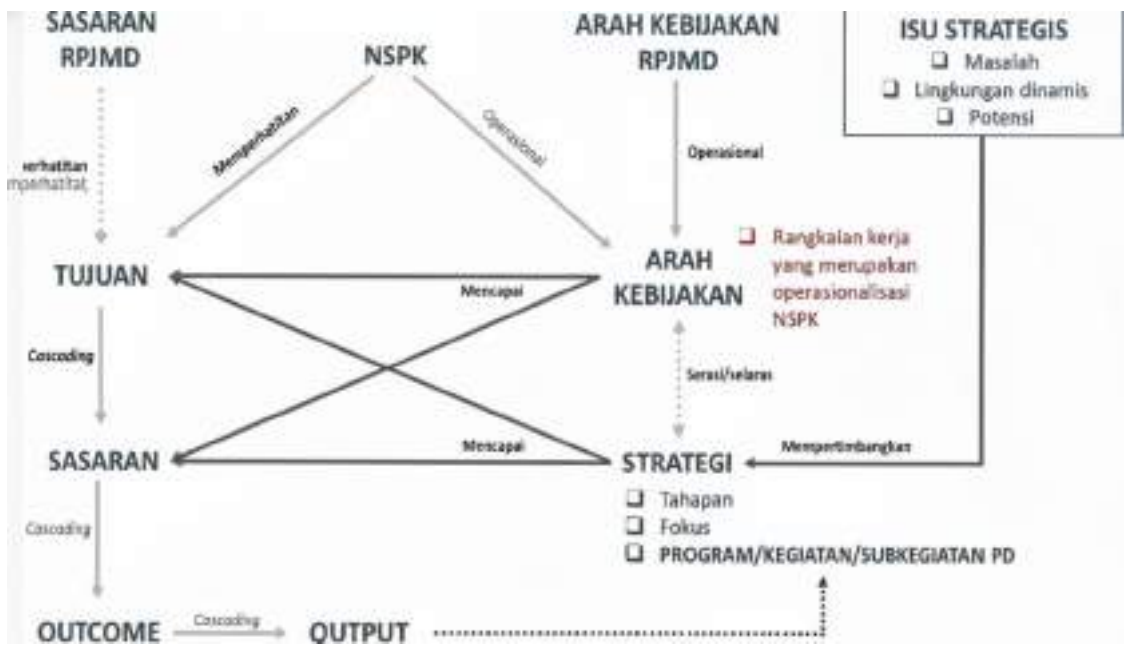
kembali dilanjutkan sebesar 0,2 poin persentase menjadi 1,0 persen, seiring dengan semakin optimalnya promosi investasi, pemanfaatan potensi unggulan daerah, serta meningkatnya kepastian berusaha. Kenaikan target yang lebih moderat pada tahun 2028 dan 2029, masing-masing sebesar 0,1 dan 0,05 poin persentase, menunjukkan strategi penguatan dan konsolidasi pertumbuhan agar tetap berkelanjutan dan tidak bersifat fluktuatif.

Secara keseluruhan, rata-rata kenaikan target pertumbuhan investasi pada periode 2025–2039 sebesar 0,24 poin persentase per tahun. Pola kenaikan yang menurun secara bertahap ini mencerminkan kehati-hatian dalam perencanaan kinerja, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi yang stabil, terukur, dan berkesinambungan. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa peningkatan investasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

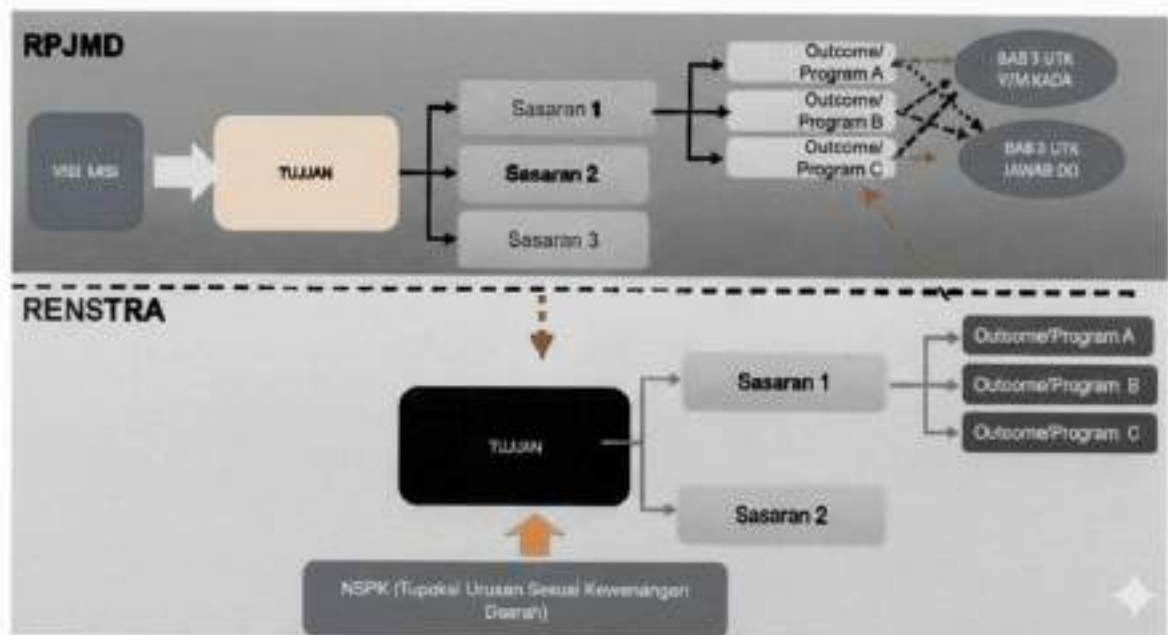
3.2 Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran RPJMD, yaitu meningkatnya investasi daerah, sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi wilayah. Sasaran ini dijabarkan secara operasional melalui upaya meningkatkan penanaman modal di Kutai Kartanegara, dengan indikator kinerja utama berupa Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN/PMA. Kondisi dasar tahun 2025 dari triwulan I sampai dengan triwulan III menunjukkan kontraksi sebesar -29,18 persen, sehingga target pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 0 persen sebagai fase stabilisasi. Selanjutnya, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 1,20 persen pada tahun 2030, mencerminkan strategi pemulihan dan penguatan investasi yang berkelanjutan dan realistis sesuai dinamika ekonomi daerah. Keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah ditunjukkan pada Gambar 3.1 dan 3.2

Gambar 3.1 Hubungan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sasaran berikutnya adalah meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah, yang diukur melalui indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi Non Ekstraktif. Baseline tahun 2024 sebesar -54,17 persen menunjukkan ketergantungan yang masih tinggi terhadap sektor ekstraktif serta perlunya transformasi struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu, target pertumbuhan sektor non ekstraktif ditetapkan meningkat secara progresif, dimulai dari 0 persen pada tahun 2025 hingga mencapai 6,70 persen pada tahun 2030. Sasaran ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong diversifikasi

investasi ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi, seperti industri pengolahan, pariwisata, perdagangan, dan jasa, guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Selanjutnya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut

Tabel 3.2 Sasaran Perangkat Daerah tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASE LINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatkan Penanaman Modal di Kutai Kartanegara	Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi non Ekstraktif (%)	-54,17	0	1,35	2,70	4,05	5,40	6,70	
		Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (Nilai)	3,9	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	

Selain aspek kuantitas dan kualitas investasi, sasaran Perangkat Daerah juga difokuskan pada meningkatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan usaha, sebagai prasyarat utama terciptanya iklim investasi yang kondusif. Indikator yang digunakan adalah Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu, dengan baseline tahun 2024 sebesar 3,8. Target indeks pelayanan ditingkatkan secara konsisten setiap tahun, dari 3,9 pada tahun 2025 hingga 4,4 pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan komitmen DPMPTSP dalam memperbaiki kualitas pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pelaku usaha.

Secara keseluruhan, sasaran Perangkat Daerah DPMPTSP dirancang secara terintegrasi untuk memastikan bahwa peningkatan investasi tidak hanya tercermin dari pertumbuhan nilai realisasi investasi, tetapi juga dari peningkatan kualitas investasi dan pelayanan publik. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang berdaya saing, mendorong transformasi ekonomi daerah, serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Perumusan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi capaian Renstra periode sebelumnya termasuk tahapan-tahapan yang dirumuskan didalamnya dan analisis faktor internal maupun faktor eksternal berdasarkan hasil telaah visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Analisis faktor-faktor internal dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sedangkan analisis faktor-faktor eksternal diperlukan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi Perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

3.2.2 Capaian Sasaran Perangkat Daerah

Ringkasan Sasaran Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025-2029, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran :

1. Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah;
2. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha.

3.3.1 Rumusan strategis

Perumusan strategi hasil analisis SWOT seperti ditunjukkan pada bagian analisis SWOT dipilih untuk dirumuskan menjadi rumusan strategi yang disesuaikan dengan isu strategis dan rumusan visi, misi, tujuan sasaran Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah melalui proses penilaian atas alternatif strategi hasil dari analisis SWOT di atas dirumuskan strategi terpilih seperti dijelaskan pada tabel SWOT. berikut:

Analisis SWOT DPMPTSP

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal sebagai berikut :

Strenghts/ Kekuatan

1. Dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung pelayanan dari APBD
2. Kapasitas Sumberdaya Manusia telah mendukung penyelenggaraan pelayanan
3. Penggunaan Teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan

4. Telah memiliki standar pelayanan dan standar prosedur operasional (SOP) yang memberikan jaminan dan kepastian pelayanan
5. Telah memiliki kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik

Weakness/ Kelemahan

1. Sarana dan Prasarana pelayanan yang belum representatif/ tidak didesain untuk pelayanan terpadu
2. Belum dimplementasikan regulasi insentif dan kemudahan penanaman modal
3. Masih terbatasnya dokumen peta potensi investasi berdasarkan RUPM
4. Belum optimalnya regulasi untuk menjawab tantangan ekonomi baru di era Revolusi Industri 5.0
5. Koordinasi dengan perangkat daerah lain masih belum maksimal

Opportunities/ Peluang

1. Peluang penanaman modal pada Sektor Pertambangan dan Perkebunan masih tinggi
2. Terbukanya industri pengolahan produk perkebunan dan turunannya
3. Keberadaan Ibu Kota Nusantara berpotensi meningkatkan Minat Investasi
4. Tumbuhnya kesadaran pelaku UMKM untuk memperoleh Perizinan Berusaha
5. Dukungan Fasilitasi kredit tanpa bunga bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari pemerintah daerah

Threats/ Ancaman

1. Kepatuhan Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM masih rendah;
2. Masih rendah minat penanaman modal pada sektor sekunder;
3. Masih adanya aturan sektoral yang belum sinkron dengan sistem aplikasi perizinan online (OSS);
4. Dominasi penanaman modal sektor Ekstraktif menurunkan daya dukung lingkungan hidup
5. Hasil produk pertambangan dan penggalian dengan tujuan ekspor rentan terhadap gejolak perekonomian dunia.

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal sebagaimana diuraikan sebelumnya, selanjutnya disusun analisa dalam rangka penyusunan strategi

yang relevan untuk dijalankan DPMPSTSP Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan program kerja.

Tabel 3.3
Analisis SWOT

IFAS EFAS	Strenghts	Weakness
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung pelayanan dari APBD 2. Kapasitas Sumberdaya Manusia telah mendukung penyelenggaraan pelayanan 3. Penggunaan Teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan 4. Telah memiliki standar pelayanan dan standar prosedur operasional (SOP) yang memberikan jaminan dan kepastian pelayanan 5. Telah memiliki kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana pelayanan yang belum representatif/ tidak didesain untuk pelayanan terpadu 2. Belum dimplementasikan regulasi insentif dan kemudahan penanaman modal 3. Masih terbatasnya dokumen peta potensi investasi berdasarkan RUPM 4. Belum optimalnya regulasi untuk menjawab tantangan ekonomi baru di era Revolusi Industri 5.0 5. Koordinasi dengan perangkat daerah lain masih belum maksimal

	Mall Pelayanan Publik	
Opportunities	S-O	W-O
1. Peluang penanaman modal pada Sektor Pertambangan dan Perkebunan masih tinggi	a. (S1:O1) Optimalisasi Anggaran untuk Investasi Sektor Unggulan	a. (W1:O1) Penataan gedung dan ruang pelayanan MPP untuk meningkatkan citra pelayanan DPMPPTSP
2. Terbukanya industri pengolahan produk perkebunan dan turunannya	b. (S2:O2) Penguatan SDM dalam Mendukung Industri Pengolahan	b. (W2:O2) Percepatan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi usaha besar yang melakukan kemitraan.
3. Keberadaan Ibu Kota Nusantara berpotensi meningkatkan Minat Investasi	c. (S3:O3) Pemanfaatan Teknologi untuk Menarik Investasi Ibu Kota Nusantara	c. (W2:O3) Percepatan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan berusaha yang memprioritaskan sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan.
4. Tumbuhnya kesadaran pelaku UMKM untuk memperoleh Perizinan Berusaha	d. (S4:O4) Membuat Standar Pelayanan untuk Mendukung UMKM	
5. Dukungan Fasilitasi kredit tanpa bunga bagi pelaku Usaha	e. (S5:O5): Sinergi Kerja Sama dalam Mendorong Akses Kredit	

Mikro dan Kecil dari pemerintah daerah		<p>d. (W3:O3) Penyusunan peta potensi investasi secara komprehensif dan bagi pengembangan industrialisasi sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan.</p> <p>e. (W4:O4) Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan komunitas IT untuk mempercepat adaptasi Revolusi Industri 5.0</p> <p>f. (W5:O5) Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam mendukung kebijakan pemerintah pada program Kredit KUKAR Idaman Terbaik dan Mini Mal Pelayanan Publik</p>
Threats	S-T	W-T
<p>1. Kepatuhan Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM masih rendah;</p> <p>2. Masih rendah minat penanaman modal pada sektor sekunder;</p>	<p>a. (S1:T1) Peningkatan anggaran kegiatan pendampingan bagi perusahaan yang wajib LKPM</p> <p>b. (S2:T2) Peningkatan Kapasitas SDM</p>	<p>a. (W1:T1) Meningkatkan kepatuhan LKPM dengan Strategi pelayanan on state</p> <p>b. (W2:T2) Sosialisasi program insentif dan kemudahan bagi</p>

<p>3. Masih adanya aturan sektoral yang belum sinkron dengan sistem aplikasi perizinan online (OSS);</p>	<p>c. (S3:T3) Optimalisasi website DPMPSTP dalam mengurangi hambatan terkait aturan sektoral yang belum sinkron</p>	<p>pelaku usaha industri sekunder dan tersier.</p>
<p>4. Dominasi penanaman modal sektor Ekstraktif menurunkan daya dukung lingkungan hidup</p>	<p>d. (S4:T4) Penerapan SOP layanan untuk meredam dampak negatif dominasi investasi ekstraktif terhadap lingkungan.</p>	<p>c. (W3:T3) Pengkajian potensi investasi secara komprehensif yang siap ditawarkan kepada investor</p>
<p>5. Hasil produk pertambangan dan penggalian dengan tujuan ekspor rentan terhadap gejolak perekonomian dunia.</p>	<p>e. (S5:T5) Kerjasama dengan berbagai pihak dalam MPP untuk mengantisipasi kerentanan ekspor sektor tambang terhadap gejolak global</p>	<p>d. (W4:T4) Menyusun regulasi investasi berbasis inovasi, teknologi hijau, dan ekonomi digital untuk mengalihkan ketergantungan dari sektor ekstraktif.</p>
		<p>e. (W5:T5) meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan OPD lain dan pemerintah daerah sekitar lainnya mewujudkan industri yang terhubung antar daerah.</p>

Tabel Matrik SWOT

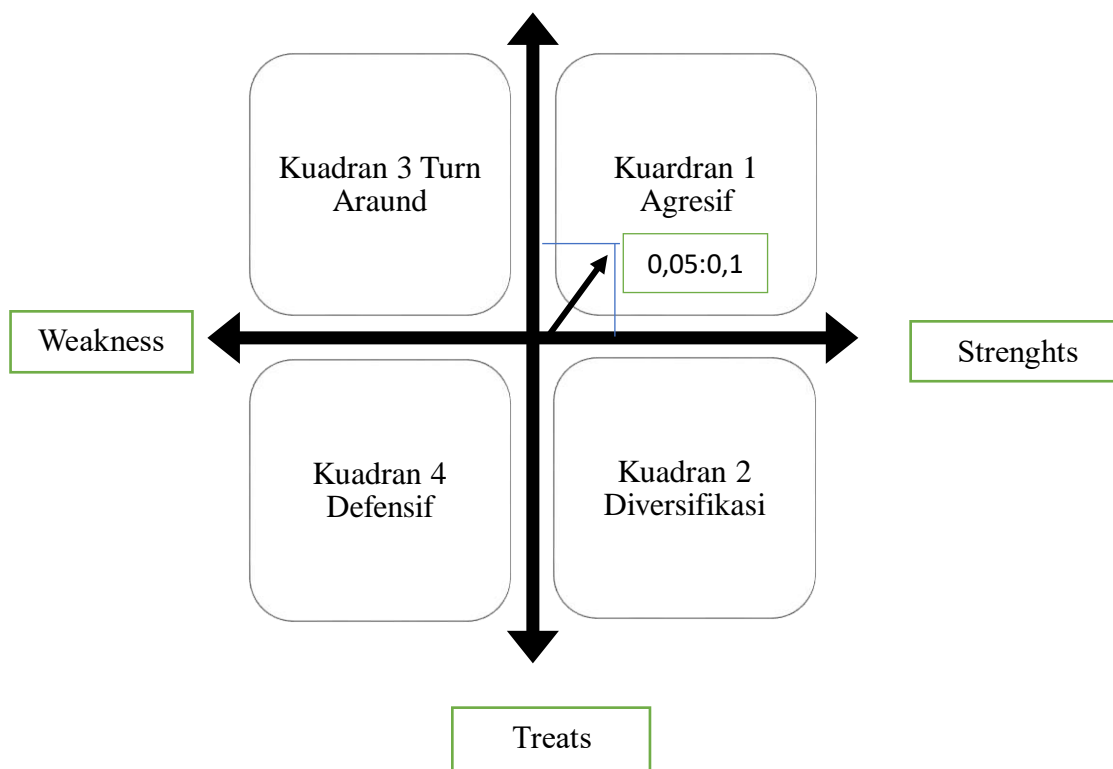
Strenghts/ Kekuatan	Bobot	Rating	Score
1. Dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung pelayanan dari APBD	0,25	4	1
2. Kapasitas Sumberdaya Manusia telah mendukung penyelenggaraan pelayanan	0,2	3	0,60

3. Penggunaan Teknologi dan informasi dalam memberikan pelayanan	0,2	4	0,80
4. Telah memiliki standar pelayanan dan standar prosedur operasional (SOP) yang memberikan jaminan dan kepastian pelayanan	0,15	3	0,45
5. Telah memiliki kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik	0,2	3	0,60
Jumlah			3,45
Weakness/ Kelemahan	Bobot	Rating	Score
1. Sarana dan Prasarana pelayanan yang belum representatif/ tidak didesain untuk pelayanan terpadu	0,25	3	0,75
2. Belum dimplementasikan regulasi insentif dan kemudahan penanaman modal	0,20	4	0,80
3. Masih terbatasnya dokumen peta potensi investasi berdasarkan RUPM	0,20	4	0,80
4. Belum optimalnya regulasi untuk menjawab tantangan ekonomi baru di era Revolusi Industri 4.0	0,20	3	0,60
5. Koordinasi dengan perangkat daerah lain masih belum maksimal	0,15	3	0,45
Jumlah			3,40
S-W			0,05
Opportunities/ Peluang	Bobot	Rating	Score
1. Peluang penanaman modal pada Sektor Pertambangan dan Perkebunan masih tinggi	0,25	4	1
2. Terbukanya industri pengolahan produk perkebunan dan turunannya	0,25	4	1
3. Keberadaan Ibu Kota Nusantara berpotensi meningkatkan Minat Investasi	0,15	3	0,45

4. Tumbuhnya kesadaran pelaku UMKM untuk memperoleh Perizinan Berusaha	0,15	3	0,45
5. Dukungan Fasilitasi kredit tanpa bunga bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dari pemerintah daerah	0,2	3	0,60
Jumlah			3,50
Threats/ Ancaman	Bobot	Rating	Score
1. Kepatuhan Pelaku Usaha Menyampaikan LKPM masih rendah	0,2	4	0,80
2. Masih rendah minat penanaman modal pada sektor sekunder	0,2	4	0,80
3. Masih adanya aturan sektoral yang belum sinkron dengan sistem aplikasi perizinan online (OSS)	0,2	3	0,60
4. Dominasi penanaman modal sektor pertambangan dan perkebunan menurunkan daya dukung lingkungan hidup	0,2	3	0,60
5. Hasil produk pertambangan dan penggalian dengan tujuan ekspor rentan terhadap gejolak perekonomian dunia.	0,2	3	0,60
Jumlah			3,40
O-T			0,10

Gambar 3.3 Matrik SWOT

Opprtunities



Berdasarkan matrik SWOT tersebut strategi DPMPTSP mendukung strategi Agresif, namun demikian nilai Peluang lebih besar daripada Kekuatan, dalam hal ini perlu efort untuk meningkatkan kemampuan dinas dalam menangkap peluang investasi.

Dilihat dari analisis SWOT dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk penahapan pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah dibawah ini

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD

Tema RPJMD				
Tema Tahun 2026	Tema Tahun 2027	Tema Tahun 2028	Tema Tahun 2029	Tema Tahun 2030
Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi Pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan pemanfaatan transformasi pembangunan	Perwujudan fondasi transformasi dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan menuju akselerasi transformasi pembangunan
<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan - Pengembangan pusat logistik dan distribusi komoditas strategis berbasis penguatan pasar domestik 	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat - Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif 	Penguatan ekosistem kewirausahaan inovatif dalam mewujudkan produk lokal masyarakat dan hilirisasi sektor strategis	Perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan sebagai fondasi transformasi pusat pangan, pariwisata, industri hijau	Penguatan rantai nilai dan akselerasi komoditas unggulan daerah berbasis lapangan usaha yang ramah lingkungan dan keanekaragaman hayati guna meningkatkan daya saing, kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan

Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan
		Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Perwujudan peran serta multi pihak dalam pengendalian ancaman kerusakan lingkungan dan pengembangan potensi energi ramah lingkungan	Penguatan pemanfaatan energi ramah lingkungan dan rendah karbon untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Adapun penahapan pembangunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui strategi berikut :

1. Pemenuhan & Pemerataan Infrastruktur/SDM

Fokus diarahkan pada pemenuhan sarana, prasarana, dan penguatan kapasitas SDM. Tujuan utamanya adalah agar pelayanan perizinan dan penanaman modal bisa diakses secara lebih merata. Langkah yang ditempuh antara lain:

1. Penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang representatif (Mal Pelayanan Publik, desk layanan sektor prioritas).
2. Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur di bidang investasi dan perizinan.
3. Perluasan jangkauan sistem digital agar menjangkau seluruh kecamatan.
4. Penyediaan konsultasi teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sumber daya dan akses layanan yang setara di seluruh wilayah.

2. Ekspansi & Peningkatan Layanan

Setelah fondasi dan pemerataan terbangun, tahun 2027 diarahkan pada perluasan cakupan layanan dan peningkatan kualitasnya. Ciri khas tahap ini adalah mulai berkembangnya layanan berbasis inovasi. Beberapa fokus utama:

1. Penguatan integrasi perizinan berbasis risiko (*Risk Based Approach*).
2. Perluasan layanan konsultasi investasi berbasis sektor unggulan.

3. Inovasi pelayanan publik digital yang lebih ramah pengguna (user friendly).
4. Fasilitasi promosi investasi untuk menjangkau mitra B2B, B2C, maupun B2G.

Tahap ini ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing daerah dan memperluas jejaring investasi.

3. Penguatan Fondasi Transformasi

Pada tahap ini, seluruh sistem pelayanan dan investasi diperkuat agar lebih adaptif terhadap perubahan global maupun kebutuhan lokal. Beberapa langkah utama:

1. Optimalisasi sistem digital pelayanan publik terintegrasi.
2. Penguatan kolaborasi lintas OPD dalam mendukung ekosistem investasi (koperasi, UMKM, pertanian, perkebunan, pariwisata).
3. Pengembangan basis data investasi yang komprehensif dan real-time.
4. Penyusunan model insentif daerah bagi investor strategis.

Tahap ini merupakan masa transisi menuju transformasi penuh pelayanan publik yang inovatif dan responsif.

4. Konsolidasi & Integrasi Program

Menjelang akhir periode, tahun 2029 diarahkan pada konsolidasi hasil yang telah dicapai. Fokus utamanya adalah menyatukan berbagai program dan inovasi agar selaras dengan visi besar daerah (*KUKAR IDAMAN TERBAIK*). Kegiatan meliputi:

1. Integrasi penuh antar sistem layanan perizinan dan investasi.
2. Konsolidasi capaian kinerja antar OPD agar sinergi pembangunan terjaga.
3. Evaluasi menyeluruh efektivitas kebijakan investasi.
4. Penyempurnaan inovasi yang sudah berjalan agar lebih berkelanjutan.

Tahap ini memastikan seluruh upaya tidak berjalan parsial, melainkan saling melengkapi untuk mendukung capaian RPJMD.

5. Pemantapan & Akselerasi

Tahun terakhir Renstra difokuskan pada pemantapan capaian dan akselerasi kinerja untuk menghadapi periode pembangunan selanjutnya. Prioritas utama:

1. Pemantapan Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu digital dan fisik.
2. Akselerasi investasi di sektor strategis (green investment, hilirisasi SDA, pariwisata berkelanjutan).

3. Implementasi penuh pelayanan publik cerdas berbasis data besar (*big data analytics*).
4. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan indeks efektivitas investasi.

Tahap ini menjadi puncak pencapaian, sekaligus tonggak awal untuk memasuki Renstra periode berikutnya dengan pondasi yang lebih kuat.

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Analisis SWOT dan penahapan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029 arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTA PD	Keterangan
1	Meningkatnya Investasi daerah	Penetapan kawasan strategis pembangunan (KEK, KPI, Kawasan Pangan, Perikanan, Perkotaan, Perdesaan)	Kepastian hukum kawasan industri/investasi Koordinasi penyediaan lahan untuk proyek investasi strategis	Menjamin ketersediaan lahan & kepastian hukum dalam kawasan strategis investasi daerah.
		Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata	Diversifikasi ekonomi ke sektor non-ekstraktif (hilirisasi pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif)	Mendukung sektor unggulan melalui fasilitasi investasi dan diversifikasi usaha non-ekstraktif.
		Peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro	Fasilitasi kemitraan UMK dengan lembaga keuangan & investor Penyederhanaan	Mendukung UMK dengan kemitraan keuangan, insentif, dan

			perizinan bagi usaha mikro	penyederhanaan perizinan.
		Penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan	Penyusunan peta potensi investasi daerah	Menyediakan dasar perencanaan berbasis data untuk pemanfaatan kawasan dan investasi.
		Pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan	Fasilitasi percepatan investasi sektor hilirisasi & sektor berkelanjutan (green & non-ekstraktif)	Mendukung hilirisasi pangan & sektor hijau melalui investasi yang terarah.
		Penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya	Insentif bagi pelaku usaha di sektor hijau, ekonomi kreatif, dan UMK	Memperkuat basis agroindustri & pariwisata dengan insentif dan fasilitasi usaha.
		Penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif	Fasilitasi investasi sektor hijau Diversifikasi ekonomi kreatif	Mendukung pengembangan ekonomi hijau dan kreatif di tingkat lokal.
		Inkubasi bisnis UMKM unggulan dan kreatif	Insentif UMK kreatif Konsultasi & publikasi teknis perizinan melalui MPP mini	Mendukung UMK kreatif dengan insentif, inkubasi, dan dukungan teknis.
		Pengembangan pusat pelatihan vokasi berbasis permintaan industri (link dan match)	Penyediaan konsultasi teknis perizinan Keterbukaan informasi publik & laporan berbasis data	Mendorong SDM daerah agar memiliki kemampuan perizinan & pemahaman investasi sesuai

				kebutuhan industri.
		Pemasaran produk unggulan desa berbasis digital Perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan sebagai fondasi transformasi pusat pangan, pariwisata, industri hijau	Digitalisasi layanan perizinan Pengembangan dashboard perizinan & investasi daerah	Menguatkan pemasaran berbasis digital dengan layanan publik digital.
		Hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan budaya menjadi produk bernilai tambah	Fasilitasi investasi hilirisasi sektor non-ekstraktif	Menghubungkan investasi daerah dengan hilirisasi sektor unggulan.
		Penguatan integrasi ekonomi antarwilayah dan mitra IKN	Koordinasi penyediaan lahan investasi Peta potensi investasi	Mendukung integrasi kawasan ekonomi Kukar dengan wilayah sekitar dan IKN.
		Peningkatan kualitas perizinan dan investasi hijau yang berkelanjutan	Digitalisasi layanan perizinan Implementasi OSS berbasis data Dashboard investasi daerah	Mewujudkan layanan investasi hijau, cepat, transparan, dan terintegrasi digital.
		Industrialisasi sektor unggulan dan pengembangan Kawasan Strategis hijau	Fasilitasi percepatan investasi hilirisasi sektor berkelanjutan Insentif pelaku usaha sektor hijau	Mendukung industrialisasi daerah dengan investasi hijau & insentif.
		Peningkatan ekspor hasil olahan pangan, perikanan dan ekonomi kreatif	Fasilitasi promosi & kemitraan investasi Dukungan	Memperluas pasar ekspor melalui promosi investasi &

			diversifikasi ekonomi kreatif	pengembangan ekonomi kreatif daerah.
		Transformasi ekonomi rendah karbon	Fasilitasi investasi hijau Insentif sektor hijau Digitalisasi OSS & data investasi	Mengarahkan investasi menuju green investment dan transformasi ekonomi rendah karbon.
		Penyusunan sistem perencanaan penganggaran terpadu	Penerapan sistem pelaporan dan evaluasi berbasis kinerja Audit internal pelayanan publik	Menyelaraskan sistem perencanaan dengan evaluasi kinerja dan audit untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pembangunan.
		Penataan kelembagaan daerah sesuai kebutuhan pembangunan baru	Reformasi birokrasi pelayanan publik Pengembangan & pengelolaan MPP	Penyesuaian kelembagaan daerah dengan pembentukan dan penguatan MPP sebagai simpul pelayanan publik modern.
		Peningkatan kapasitas asn dan tata kelola kelembagaan publik	Pelatihan teknis perizinan, investasi, dan pelayanan publik digital Penerapan reward ASN	Meningkatkan kualitas ASN melalui pelatihan teknis serta sistem penghargaan berbasis kinerja.
		Penguatan Mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja	Penerapan sistem pelaporan & evaluasi kinerja Publikasi indikator kinerja layanan ke publik	Menguatkan akuntabilitas publik melalui transparansi laporan kinerja

				dan indikator layanan.
		Digitalisasi pelayanan publik	Modernisasi layanan publik digital Pengembangan User Experience (UX) sistem layanan Mobile Perizinan MPP	Menyediakan layanan publik berbasis digital yang mudah diakses, ramah pengguna, dan menjangkau hingga kecamatan.
		Penguatan sistem pengaduan	Audit internal layanan Publikasi indikator kinerja	Menjamin pengawasan mutu layanan publik melalui kanal pengaduan, audit, dan publikasi kinerja.
		Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan	Publikasi indikator layanan ke publik Mobile konsultasi investasi	Mendorong partisipasi masyarakat dengan transparansi informasi dan akses konsultasi layanan.
		Tata kelola adaptif, inovatif, kolaboratif berbasis pentahapan	Pengembangan dashboard & User Experience (UX) pelayanan publik	Mengintegrasikan data lintas sektor dengan dashboard layanan perizinan dan investasi yang ramah pengguna.
		Aplikasi dashboard lintas sektor	Reformasi birokrasi berdampak Penyesuaian layanan publik sektor prioritas	Menyelaraskan prinsip tata kelola adaptif dengan birokrasi responsif

				terhadap kebutuhan sektor usaha.
		Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah	Layanan MPP Mini Digital di kecamatan Mobile perizinan	Mendukung stabilitas dengan layanan publik yang lebih dekat ke masyarakat, cepat, dan transparan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Indikasi rencana program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara berisi program-program baik untuk mencapai Pembangunan Jangka Menengah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyusunan RKPDP Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Penjelasan Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Target program ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 78,50. Program ini bertujuan untuk optimalisasi proses perencanaan program dan anggaran, serta optimalisasi monitoring terhadap proses pelaksanaan kegiatan instansi, dan melakukan evaluasi kinerja untuk perbaikan proses ke depan serta menjadi bahan masukan bagi proses perencanaan program dan anggaran di tahun – tahun berikutnya. Selain itu juga untuk optimalisasi proses kerja instansi dengan memastikan semua fasilitas operasional perkantoran serta pendukung proses kerja instansi terpenuhi, optimalisasi penyediaan sarana prasarana untuk mendukung proses kerja dan operasional instansi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai ketugasan di bidang pelayanan publik. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini menjadi program yang penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan publik (terutama dari aspek fisik) sesuai yang tertuang dalam

peraturan perundangan terpenuhi. Sejak tahun 2022, proses perbaikan (rehab) dan pemeliharaan gedung terus diupayakan dilakukan sesuai dengan standar fasilitas pelayanan publik yang telah ditentukan yaitu Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Permendagri No. 138 Tahun 2017 diantaranya Ruang *front Office*, *Back Office* yang mendukung dalam pelayanan perizinan memadai serta tersedianya ruang pendukung dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang terus di upgrade serta mempertimbangkan inovasi pelayanan publik yang dipandang perlu. Disamping itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Juga mempunyai *specio* yaitu Mal Pelayanan Publik sebagai sarana pelayanan terpadu di Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga harus ditingkatkan Sarana dan prasarananya serta operasional kegiatannya.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Target program ini adalah realisasi total terhadap target investasi yang diambil dari tarikan Aplikasi Kementerian investasi (*National Sistem Window for Investment*) yang telah terintegrasi dengan sistem OSS (*Online Single Submission*). Bentuk kegiatannya meliputi pembuatan peta potensi investasi daerah dan penetapan peraturan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kutai kartanegara. bentuk – bentuk keluaran dari program dan kegiatan ini diantaranya adalah pembuatan regulasi penanaman modal daerah, fasilitasi percepatan realisasi investasi serta pembuatan dokumen – dokumen kajian potensi investasi.

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Target program ini adalah Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi yang menanamkan modal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan bentuk kegiatannya meliputi Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara, indikator kinerja yang ditentukan adalah Jumlah Dokumen kegiatan Promosi Penanaman Modal. Bentuk – bentuk keluaran dari program dan kegiatan ini diantaranya adalah pameran investasi, temu investor serta penyusunan profil investasi Kukar, serta temu kemitraan dengan mitra – mitra luar Kabupaten/Kota. Proses yang sedang berlangsung saat ini adalah penyusunan konsep pelaksanaan kegiatan dengan mencari model – model inovasi promosi investasi serta

optimalisasi kerjasama luar Kabupaten agar hasil yang dicapai dapat dioptimalkan.

4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Target program ini adalah Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan. Dengan bentuk kegiatannya menitik beratkan kepada pelayanan publik, dalam hal penerbitan izin, indikator kinerja yang ditentukan adalah Nilai IKM berdasarkan survei tahun n. Unsur-unsur IKM terdiri dari persyaratan, prosedur perizinan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, dan penanganan pengaduan. Dari beberapa unsur tersebut yang paling mendesak untuk segera diberikan perhatian lebih adalah terkait sarana dan prasaran yang memiliki kualitas belum maksimal terlebih menjadi komponen yang memiliki rate terendah dibanding komponen/unsur lainnya. Bentuk – bentuk keluaran dari program dan kegiatan ini diantaranya adalah Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Kabupaten/kota, Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Proses yang sedang berlangsung saat ini adalah terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan terus berupaya mencari model – model inovasi dan implementasi Undang – Undang Cipta kerja.

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Target program ini adalah Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha. Bentuk kegiatannya adalah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Bentuk – bentuk keluaran dari program dan kegiatan ini diantaranya adalah penanganan permasalahan penanaman modal,

pemantauan dan pengawasan perusahaan untuk optimalisasi pelaporan (melalui LKPM), dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Target program ini adalah persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal. bentuk kegiatan pada program ini menitikberatkan kepada pengelolaan data dan informasi perizinan dan non Perizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat daerah Provinsi dengan sub kegiatan pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan. data dan informasi perizinan yang diolah dapat dikaji dan dimanfaatkan untuk perencanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman modal serta perencanaan promosi, dan perumusan kebijakan.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga didukung oleh beberapa perangkat daerah adapun dapat dilihat pada tabel 4.1 Penjenjangan kinerja DPMPTSP dibawah ini

Tabel 4.1 Tabel Penjenjangan Kinerja DMPTSP

Outcome	Intermediate Outcome / Critical Succes Factor (CSF)	Immediate Outcome	Kondisi Operasional
Meningkatnya investasi daerah (Pertumbuhan realisasi investasi (PMDN & PMA))	Regulasi jelas & sinkron dengan nasional (Adanya perda/perbup pendukung investasi)	Kepastian hukum investasi meningkat (Jumlah regulasi investasi disahkan)	Penyusunan & pengesahan perda/perbup (Jumlah perda/perbup yang disusun dan diterapkan)
	SDM & kelembagaan DPMPTSP yang kompeten (Persentase ASN yang Kompeten)	Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme ASN DPMPTSP (Jumlah ASN DPMPTSP yang dilakukan peningkatan kompetensi)	Sertifikasi Kompetensi SDM Layanan Perizinan dan Investasi (Jumlah setifikat kompetensi ASN)

Infrastruktur pendukung investasi tersedia (Infrastruktur kawasan investasi siap pakai)	Investor mendapat fasilitas yang efektif (Jumlah investor difasilitasi)	Operasionalisasi OSS & MPP (Jumlah layanan OSS/MPP dimanfaatkan investor)
	Peta peluang investasi sektoral tersedia (Jumlah peta peluang per sektor terbit)	Penyusunan & publikasi peta investasi (Jumlah peta investasi yang dipublikasikan)
Kolaborasi lintas sektor (B2B, B2G, B2C) berjalan (Jumlah kerjasama B2B/B2G/B2C terjalin)	Kemitraan produktif terbangun (Jumlah business matching terlaksana)	Forum investasi & promosi daerah (Jumlah forum promosi yang terlaksana)
		Business matching investor-UMKM (Jumlah business matching dan UMKM terlibat)
Tata kelola investasi transparan & ramah lingkungan (Tingkat kepatuhan terhadap standar green investment)	Kepuasan layanan meningkat (Nilai IKM layanan investasi)	Pelatihan & penguatan kapasitas SDM (Jumlah SDM yang dilatih)

4.2 Uraian Kegiatan

1. Penetapan Pemberian Fasilitas dan/atau Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyusunan dan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal. Pelaksanaan kegiatan meliputi pengkajian kebutuhan insentif, penyelarasan dengan kebijakan nasional dan daerah, serta penyusunan regulasi daerah sebagai dasar hukum pemberian insentif investasi. Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan minat investor, khususnya pada sektor non-ekstraktif dan bernilai tambah, serta memperkuat daya saing daerah dalam menarik penanaman modal.

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Kegiatan pembuatan peta potensi investasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan mendokumentasikan potensi investasi daerah secara komprehensif dan terintegrasi. Kegiatan ini mencakup penyusunan kajian peluang investasi, pemutakhiran data potensi investasi, serta penyusunan peta potensi investasi yang berbasis wilayah dan sektor unggulan. Hasil kegiatan ini menjadi dasar perencanaan penanaman modal, bahan promosi investasi, serta referensi bagi calon investor dalam mengambil keputusan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan jumlah dan kualitas investasi melalui pelaksanaan promosi penanaman modal secara terencana dan terarah. Promosi dilakukan melalui berbagai media dan forum, seperti pameran investasi, temu bisnis, forum investasi, serta publikasi potensi unggulan daerah. Kegiatan ini juga menghasilkan dokumen hasil promosi sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kerja sama investasi, sehingga promosi penanaman modal dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan berdampak nyata.

4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan untuk memastikan realisasi investasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha, bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal. Melalui kegiatan ini, DPMPSTSP berupaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, kelancaran realisasi investasi, serta meminimalkan risiko dan dampak negatif penanaman modal.

5. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan inti dari pelaksanaan tugas DPMPSTSP dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan usaha secara terpadu, cepat, dan transparan. Pelayanan dilaksanakan melalui sistem

perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik, didukung dengan layanan konsultasi, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepastian berusaha, kualitas pelayanan publik, dan kepuasan masyarakat serta pelaku usaha.

6. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pengolahan, penyajian, pemanfaatan, serta pemutakhiran data perizinan dan penanaman modal dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi. Kegiatan ini mendukung terwujudnya pelayanan berbasis data, transparansi informasi, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan perizinan.

7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyusunan laporan kinerja perangkat daerah. Kegiatan ini menjadi dasar pengendalian kinerja dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas DPMPTSP.

8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan keuangan perangkat daerah berjalan secara tertib, efisien, dan akuntabel. Kegiatan ini mencakup pengelolaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi prasyarat kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP.

9. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk mengelola barang milik daerah secara tertib dan optimal. Pelaksanaan kegiatan meliputi pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang digunakan oleh DPMPTSP. Pengelolaan barang milik daerah

yang baik mendukung efektivitas operasional pelayanan dan akuntabilitas aset daerah.

10. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Kegiatan meliputi penatausahaan, pelaporan, serta pengendalian pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

11. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepegawaian diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia perangkat daerah secara profesional. Kegiatan ini mencakup pengelolaan data kepegawaian, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta pelayanan administrasi kepegawaian. Pengelolaan SDM yang baik menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas pelayanan DPMPTSP.

12. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah. Kegiatan ini meliputi pengelolaan persuratan, kearsipan, ketatausahaan, serta dukungan administrasi lainnya. Administrasi umum yang tertib dan efisien menjadi fondasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

13. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas DPMPTSP. Pengadaan barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Kegiatan ini bertujuan mendukung kelancaran pelayanan dan operasional perangkat daerah.

14. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Kegiatan ini mencakup penyediaan jasa kebersihan, keamanan, pemeliharaan, dan jasa pendukung lainnya. Penyediaan jasa penunjang yang memadai memastikan lingkungan kerja yang kondusif dan pelayanan yang optimal.

15. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan untuk menjaga kondisi dan fungsi sarana prasarana agar tetap layak pakai. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan rutin dan berkala terhadap aset yang digunakan DPMPTSP. Pemeliharaan yang baik mendukung keberlanjutan pelayanan dan efisiensi penggunaan aset daerah.

16. Penataan Organisasi

Kegiatan penataan organisasi diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi struktur organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini meliputi evaluasi struktur organisasi, penyesuaian tugas dan fungsi, serta penyempurnaan tata kerja sesuai dinamika kebijakan dan kebutuhan pelayanan. Penataan organisasi yang tepat mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan DPMPTSP.

Adapun untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu juga didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dapat dilihat pada tabel teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan renstra perangkat daerah pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
- Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatkan Penanaman Modal di Kutai Kartanegara	Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien		Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (%)		
					Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi non Ekstraktif (%)		
					Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.18.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.18.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2.18.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2.18.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Realisasi total investasi (triliun rupiah)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
					Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Jumlah draft peraturan kepala daerah terkait insentif investasi yang ditetapkan. (Perbup/Perda) yang mendukung sektor non-ekstraktif)	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen potensi investasi yang dihasilkan (Dokumen IPRO)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Dokumen letter of intent (LOI)	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (%)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disusun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
		Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha			Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.18.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.18.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2.18.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2.18.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (%)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

4.3 Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2030 ini merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang disusun guna mendukung penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 5 (lima) Tahun kedepan dan merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2030.

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2030 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 sampai dengan 2030 bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kutai Kartanegara serta merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) per Tahun dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil perencanaan kerja setiap tahunnya.

Adapun Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini:

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				23.534.440.481,00		26.006.463.819,36		26.835.831.784,29		29.543.659.910,41		33.020.956.558,38		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.934.440.481,00		18.786.463.819,36		19.735.927.864,29		22.025.512.532,41		23.177.237.320,38		
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	78,54	79,33	16.934.440.481,00	79,72	18.786.463.819,36	80,12	19.735.927.864,29	80,52	22.025.512.532,41	80,93	23.177.237.320,38	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				753.671.500,00		977.661.130,00		1.042.000.000,00		1.160.208.790,00		1.266.532.620,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	753.671.500,00	2	977.661.130,00	2	1.042.000.000,00	2	1.160.208.790,00	2	1.266.532.620,00		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2		2		3		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	1		3		3		3		3			
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000,00		165.000.000,00		180.000.000,00		195.000.000,00		210.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2	150.000.000,00	2	165.000.000,00	3	180.000.000,00	2	195.000.000,00	2	210.000.000,00		
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		180.000.000,00		210.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	1	50.000.000,00	3	150.000.000,00	3	165.000.000,00	3	180.000.000,00	3	210.000.000,00		
2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.343.200,00		120.000.000,00		132.000.000,00		144.000.000,00		156.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	60.343.200,00	2	120.000.000,00	2	132.000.000,00	2	144.000.000,00	2	156.000.000,00		
2.18.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	140.000.000,00		
2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		
2.18.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				293.328.300,00		322.661.130,00		325.000.000,00		381.208.790,00		410.532.620,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2	2	293.328.300,00	2	322.661.130,00	2	325.000.000,00	2	381.208.790,00	2	410.532.620,00		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.850.949.029,00		11.886.616.683,36		11.905.478.189,29		11.991.773.649,41		12.038.715.189,38		
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	11.850.949.029,00	1	11.886.616.683,36	1	11.905.478.189,29	1	11.991.773.649,41	1	12.038.715.189,38		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.381.533.629,00		11.381.533.629,36		11.381.533.629,29		11.381.533.629,41		11.381.533.629,38		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66	100	11.381.533.629,00	100	11.381.533.629,36	100	11.381.533.629,29	100	11.381.533.629,41	100	11.381.533.629,38		
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				33.750.000,00		37.125.000,00		40.500.000,00		43.875.000,00		47.250.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	12	33.750.000,00	12	37.125.000,00	12	40.500.000,00	12	43.875.000,00	12	47.250.000,00		
2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				33.750.000,00		37.125.000,00		40.500.000,00		43.875.000,00		47.250.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	33.750.000,00	1	37.125.000,00	1	40.500.000,00	1	43.875.000,00	1	47.250.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		
2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				18.703.800,00		20.574.180,00		22.444.560,00		24.314.940,00		26.185.320,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	18.703.800,00	1	20.574.180,00	1	22.444.560,00	1	24.314.940,00	1	26.185.320,00		
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				299.461.600,00		318.133.874,00		320.000.000,00		389.300.080,00		419.246.240,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	24	24	299.461.600,00	24	318.133.874,00	24	320.000.000,00	24	389.300.080,00	24	419.246.240,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				33.750.000,00		37.125.000,00		40.500.000,00		43.875.000,00		47.250.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	33.750.000,00	1	37.125.000,00	1	40.500.000,00	1	43.875.000,00	1	47.250.000,00		
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				164.999.000,00		181.498.900,00		197.998.800,00		214.498.700,00		230.998.600,00		
Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	164.999.000,00	12	181.498.900,00	12	197.998.800,00	12	214.498.700,00	12	230.998.600,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2		1		1		1		1			
2.18.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				14.999.000,00		16.498.900,00		17.998.800,00		19.498.700,00		20.998.600,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	14.999.000,00	2	16.498.900,00	2	17.998.800,00	2	19.498.700,00	2	20.998.600,00		
2.18.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2	2	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				40.000.000,00		44.000.000,00		48.000.000,00		52.000.000,00		56.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	6	40.000.000,00	6	44.000.000,00	6	48.000.000,00	6	52.000.000,00	6	56.000.000,00		
2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	60.000.000,00	12	65.000.000,00	12	70.000.000,00		
2.18.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00	1	14.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				20.000.000,00		92.000.000,00		79.000.000,00		86.000.000,00		93.000.000,00		
Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1		20.000.000,00	1	92.000.000,00	1	79.000.000,00	1	86.000.000,00	1	93.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1			1									
2.18.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				0,00		20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0,00	1	20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1		0,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00		
2.18.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		28.000.000,00		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12	12	20.000.000,00	12	22.000.000,00	12	24.000.000,00	12	26.000.000,00	12	28.000.000,00		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				175.000.000,00		957.000.000,00		1.190.200.000,00		1.486.900.000,00		1.651.600.000,00		
Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0		175.000.000,00	2	957.000.000,00	2	1.190.200.000,00	2	1.486.900.000,00	2	1.651.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0			3										
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	150	75		119		119		119		119				
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0			1		2		3		3				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	75	160		119		119		119		119				
2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		75.000.000,00		0,00		0,00		0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0		0,00	3	75.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		150.000.000,00		385.000.000,00		608.500.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		0,00	1	150.000.000,00	2	385.000.000,00	3	608.500.000,00	3	700.000.000,00		
2.18.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0		0,00	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	60.000.000,00	2	65.000.000,00		
2.18.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				25.000.000,00		75.000.000,00		82.500.000,00		90.000.000,00		97.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	25.000.000,00	4	75.000.000,00	4	82.500.000,00	4	90.000.000,00	4	97.500.000,00		
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000,00		357.000.000,00		392.700.000,00		428.400.000,00		464.100.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	75	160	100.000.000,00	119	357.000.000,00	119	392.700.000,00	119	428.400.000,00	119	464.100.000,00		
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	150	75	50.000.000,00	119	250.000.000,00	119	275.000.000,00	119	300.000.000,00	119	325.000.000,00		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.175.000.000,00		1.522.500.000,00		1.680.000.000,00		2.049.500.000,00		2.235.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	1.175.000.000,00	12	1.522.500.000,00	12	1.680.000.000,00	12	2.049.500.000,00	12	2.235.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	500	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0			4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0			1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	65.000.000,00		
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				300.000.000,00		330.000.000,00		360.000.000,00		390.000.000,00		420.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	360.000.000,00	1	390.000.000,00	1	420.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		480.000.000,00		540.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	300.000.000,00	1	325.000.000,00	1	350.000.000,00	1	480.000.000,00	1	540.000.000,00		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				250.000.000,00		255.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	250.000.000,00	2	255.000.000,00	2	300.000.000,00	2	325.000.000,00	2	350.000.000,00		
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				25.000.000,00		27.500.000,00		30.000.000,00		32.500.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	25.000.000,00	12	27.500.000,00	12	30.000.000,00	12	32.500.000,00	12	35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0,00		50.000.000,00		82.500.000,00		90.000.000,00		97.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0		0,00	4	50.000.000,00	4	82.500.000,00	4	90.000.000,00	4	97.500.000,00		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250.000.000,00		410.000.000,00		420.000.000,00		582.000.000,00		630.500.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	250.000.000,00	12	410.000.000,00	12	420.000.000,00	12	582.000.000,00	12	630.500.000,00		
2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000,00		75.000.000,00		82.500.000,00		90.000.000,00		97.500.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	500	12	50.000.000,00	12	75.000.000,00	12	82.500.000,00	12	90.000.000,00	12	97.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		150.000.000,00		862.592.680,00		2.051.875.000,00		905.502.500,00		
Jumlah Laporan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0,00	100	150.000.000,00		862.592.680,00		2.051.875.000,00		905.502.500,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0									5			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0							2					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	180					30		30					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0					10							

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		1.551.875.000,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0,00		0,00		0,00	2	1.551.875.000,00		0,00		
2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		905.502.500,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0,00		0,00		0,00		0,00	5	905.502.500,00		
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0,00	100	150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	180		0,00		0,00	30	500.000.000,00	30	500.000.000,00		0,00		
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		362.592.680,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0,00		0,00	10	362.592.680,00		0,00		0,00		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.639.110.952,00		1.803.477.106,00		1.984.148.195,00		2.156.486.393,00		2.348.958.411,00		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.639.110.952,00	12	1.803.477.106,00	12	1.984.148.195,00	12	2.156.486.393,00	12	2.348.958.411,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	2											
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.550.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	2	2.550.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				266.766.216,00		296.766.216,00		326.766.216,00		356.766.216,00		386.766.216,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	266.766.216,00	12	296.766.216,00	12	326.766.216,00	12	356.766.216,00	12	386.766.216,00		
2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36.421.200,00		40.000.000,00		44.000.000,00		48.000.000,00		52.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	36.421.200,00	12	40.000.000,00	12	44.000.000,00	12	48.000.000,00	12	52.000.000,00		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.333.373.536,00		1.466.710.890,00		1.613.381.979,00		1.751.720.177,00		1.910.192.195,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.333.373.536,00	12	1.466.710.890,00	12	1.613.381.979,00	12	1.751.720.177,00	12	1.910.192.195,00		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.155.710.000,00		1.115.710.000,00		684.510.000,00		708.270.000,00		2.276.430.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		1.155.710.000,00	22	1.115.710.000,00	22	684.510.000,00	22	708.270.000,00	22	2.276.430.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	149	149		149		149		149		149			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1									
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)														
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				565.710.000,00		69.320.000,00		69.320.000,00		69.320.000,00		69.320.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	565.710.000,00	1	69.320.000,00	1	69.320.000,00	1	69.320.000,00	1	69.320.000,00			
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		496.390.000,00		496.390.000,00		496.390.000,00		496.390.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0,00	22	496.390.000,00	22	496.390.000,00	22	496.390.000,00	22	496.390.000,00			
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				90.000.000,00		90.000.000,00		118.800.000,00		142.560.000,00		1.710.720.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	149	149	90.000.000,00	149	90.000.000,00	149	118.800.000,00	149	142.560.000,00	149	1.710.720.000,00		
2.18.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
2.18.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				500.000.000,00		460.000.000,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	500.000.000,00	1	460.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
2.18.01.2.13 - Penataan Organisasi				0,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan tatalaksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	0		0,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00		
2.18.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				0,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	0		0,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				2.500.000.000,00		1.075.000.000,00		1.705.000.000,00		1.868.147.378,00		3.676.219.238,00		
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total investasi (triliun rupiah)	11,62	11,80	2.500.000.000,00	12,07	1.075.000.000,00	12,43	1.705.000.000,00	12,85	1.868.147.378,00	13,39	3.676.219.238,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	105,84	74,87		75,98		77,67		79,93		82,58			
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				450.000.000,00		825.000.000,00		540.000.000,00		585.000.000,00		880.000.000,00		
Jumlah draft peraturan kepala daerah terkait insentif investasi yang ditetapkan. (Perbup/Perda) yang mendukung sektor non-ekstraktif)	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2		450.000.000,00	2	825.000.000,00		540.000.000,00		585.000.000,00	1	880.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	100	3		3		4		4		5			
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				0,00		330.000.000,00		0,00		0,00		250.000.000,00		
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2		0,00	2	330.000.000,00		0,00		0,00	1	250.000.000,00		
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				450.000.000,00		495.000.000,00		540.000.000,00		585.000.000,00		630.000.000,00		
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	100	3	450.000.000,00	3	495.000.000,00	4	540.000.000,00	4	585.000.000,00	5	630.000.000,00		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				2.050.000.000,00		250.000.000,00		1.165.000.000,00		1.283.147.378,00		2.796.219.238,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen potensi investasi yang dihasilkan (Dokumen IPRO)	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	2.050.000.000,00		250.000.000,00		1.165.000.000,00	1	1.283.147.378,00		2.796.219.238,00		
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	3		0		2		1		4			
	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0			5		5		5		5			
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000,00		0,00		0,00		275.000.000,00		0,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	250.000.000,00		0,00		0,00	1	275.000.000,00		0,00		
2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				0,00		250.000.000,00		165.000.000,00		180.000.000,00		195.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0		0,00	5	250.000.000,00	5	165.000.000,00	5	180.000.000,00	5	195.000.000,00		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1.800.000.000,00		0,00		1.000.000.000,00		828.147.378,00		2.601.219.238,00		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	3	1.800.000.000,00	0	0,00	2	1.000.000.000,00	1	828.147.378,00	4	2.601.219.238,00		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				1.050.000.000,00		825.000.000,00		1.560.000.000,00		2.010.000.000,00		2.497.500.000,00		
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)	75	80	1.050.000.000,00	83	825.000.000,00	85	1.560.000.000,00	88	2.010.000.000,00	90	2.497.500.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.050.000.000,00		825.000.000,00		1.560.000.000,00		2.010.000.000,00		2.497.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Dokumen letter of intent (LOI)	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1	1	1.050.000.000,00		825.000.000,00	2	1.560.000.000,00		2.010.000.000,00	1	2.497.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2		3		4		5		6			
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				750.000.000,00		825.000.000,00		1.250.000.000,00		2.010.000.000,00		2.177.500.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	750.000.000,00	3	825.000.000,00	4	1.250.000.000,00	5	2.010.000.000,00	6	2.177.500.000,00		
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				300.000.000,00		0,00		310.000.000,00		0,00		320.000.000,00		
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1	1	300.000.000,00		0,00	2	310.000.000,00		0,00	1	320.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				1.300.000.000,00		1.495.000.000,00		1.535.000.000,00		1.665.000.000,00		1.820.000.000,00		
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	100	100	1.300.000.000,00	100	1.495.000.000,00	100	1.535.000.000,00	100	1.665.000.000,00	100	1.820.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				1.300.000.000,00		1.495.000.000,00		1.535.000.000,00		1.665.000.000,00		1.820.000.000,00		
Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	5	1.300.000.000,00	2	1.495.000.000,00	1	1.535.000.000,00	1	1.665.000.000,00	1	1.820.000.000,00		
	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	339	339		339		339		339		339			
	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	100	100		1.589		1.640		1.694		1.748			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1.000	1.082		1.126		1.170		1.214		1.258			
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				100.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	5	100.000.000,00	2	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00		
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				400.000.000,00		440.000.000,00		480.000.000,00		500.000.000,00		540.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1.000	1.082	400.000.000,00	1.126	440.000.000,00	1.170	480.000.000,00	1.214	500.000.000,00	1.258	540.000.000,00		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				300.000.000,00		330.000.000,00		305.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	100	100	300.000.000,00	1.589	330.000.000,00	1.640	305.000.000,00	1.694	310.000.000,00	1.748	320.000.000,00		
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				500.000.000,00		525.000.000,00		450.000.000,00		455.000.000,00		460.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	339	339	500.000.000,00	339	525.000.000,00	339	450.000.000,00	339	455.000.000,00	339	460.000.000,00		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				750.000.000,00		825.000.000,00		900.000.000,00		975.000.000,00		1.050.000.000,00		
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (%)	75	77	750.000.000,00	79	825.000.000,00	80	900.000.000,00	82	975.000.000,00	84	1.050.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				750.000.000,00		825.000.000,00		900.000.000,00		975.000.000,00		1.050.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disusun	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	30	32	750.000.000,00	33	825.000.000,00	34	900.000.000,00	35	975.000.000,00	36	1.050.000.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	400	561		210		450		240		255			
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	50												
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				450.000.000,00		495.000.000,00		540.000.000,00		585.000.000,00		630.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	400	561	450.000.000,00	210	495.000.000,00	450	540.000.000,00	240	585.000.000,00	255	630.000.000,00		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				300.000.000,00		330.000.000,00		360.000.000,00		390.000.000,00		420.000.000,00		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	30	32	300.000.000,00	33	330.000.000,00	34	360.000.000,00	35	390.000.000,00	36	420.000.000,00		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				1.000.000.000,00		3.000.000.000,00		1.399.903.920,00		1.000.000.000,00		800.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (%)	100	100	1.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	1.399.903.920,00	100	1.000.000.000,00	100	800.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000,00		3.000.000.000,00		1.399.903.920,00		1.000.000.000,00		800.000.000,00		
Jumlah data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	15	12	1.000.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	1.399.903.920,00	12	1.000.000.000,00	12	800.000.000,00		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				1.000.000.000,00		3.000.000.000,00		1.399.903.920,00		1.000.000.000,00		800.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	15	12	1.000.000.000,00	12	3.000.000.000,00	12	1.399.903.920,00	12	1.000.000.000,00	12	800.000.000,00		

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam fasilitasi investasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang selaras dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah. Sub kegiatan tersebut merupakan turunan langsung dari program sesuai nomenklatur, yang secara substantif diarahkan untuk menghasilkan outcome konkret, seperti meningkatnya realisasi investasi, terciptanya lapangan kerja baru, meningkatnya kepuasan pelayanan publik, serta tercapainya target iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Daftar sub kegiatan ini juga merupakan bagian integral dari penjabaran strategi pembangunan jangka menengah daerah dan diletakkan sebagai pengungkit kinerja prioritas daerah.

Setiap sub kegiatan prioritas yang ditetapkan DPMPTSP memiliki keterkaitan logis dan fungsional dengan outcome program prioritas yang lebih luas. Misalnya, sub kegiatan penyusunan peta potensi investasi dan penetapan insentif daerah secara langsung mendukung Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah. Demikian pula, sub kegiatan pelaksanaan strategi promosi penanaman modal dan fasilitasi kemitraan usaha mikro merupakan bentuk operasionalisasi dari Program Promosi Penanaman Modal, yang outcome-nya diukur dari meningkatnya minat investor terhadap sektor hilir dan ekonomi kreatif yang menjadi prioritas Kukar.

Dari sisi pelayanan publik, sub kegiatan seperti penyediaan layanan OSS berbasis risiko, pengelolaan Mal Pelayanan Publik (MPP), serta penyajian dan pemanfaatan data perizinan merupakan instrumen utama dalam mendukung Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data Penanaman Modal. Keterkaitan sub kegiatan ini tidak hanya berdampak pada penyederhanaan birokrasi dan percepatan layanan, tetapi juga berkontribusi terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan, sebagaimana ditekankan dalam Misi Bupati Kukar. Dengan demikian, seluruh sub kegiatan prioritas DPMPTSP merupakan instrumen nyata yang mendukung capaian outcome pembangunan daerah secara berkelanjutan dan terukur, serta memastikan kesinambungan arah kebijakan lintas tahun sesuai penahapan RPJMD dan RPJPD 2025–2030. Adapun Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2.	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
3.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i> Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>(05)</i>
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
4.	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama DPMPTSP, yaitu meningkatnya realisasi investasi sektor non-ekstraktif dan membaiknya indeks kualitas pelayanan publik, maka diperlukan strategi terarah dan integratif dalam perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Fokus utama diarahkan pada pengembangan iklim investasi yang sehat dan efisien, peningkatan pelayanan berbasis digital, serta promosi dan fasilitasi investasi berkelanjutan. Upaya tersebut diselaraskan dengan misi kepala daerah serta RPJMD 2025–2030 yang menekankan transformasi ekonomi hijau dan pelayanan publik modern.

Program pengembangan iklim penanaman modal diarahkan untuk memperkuat ekosistem investasi yang kondusif dan inklusif. Kegiatan utama dalam program ini mencakup penyusunan kajian peluang investasi sektor non-ekstraktif, deregulasi perizinan, dan harmonisasi kebijakan investasi dengan sektor potensial seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Subkegiatan strategisnya antara lain penyusunan *investment profile*, penyederhanaan SOP perizinan, dan peningkatan koordinasi lintas sektor terkait kemudahan berusaha.

Program ini menjadi tulang punggung untuk mendorong realisasi investasi melalui promosi aktif kepada investor domestik maupun asing. Kegiatan seperti penyelenggaraan forum investasi daerah, partisipasi dalam pameran nasional dan internasional, serta pengembangan platform digital promosi menjadi andalan. Subkegiatan lainnya mencakup penyusunan dokumen potensi investasi tematik (green economy, industri kreatif), penguatan branding daerah melalui media daring, dan pemanfaatan data spasial berbasis GIS untuk promosi lahan potensial.

Untuk memastikan realisasi investasi berjalan efektif, DPMPTSP melaksanakan program pengendalian yang berisi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi. Kegiatan ini meliputi pengumpulan laporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), verifikasi lapangan, serta penyusunan laporan capaian sektor non-ekstraktif. Subkegiatan seperti pembinaan kepada pelaku usaha, fasilitasi penyelesaian hambatan investasi, dan pengembangan sistem monitoring digital menjadi penopang utama.

Guna meningkatkan indeks kualitas pelayanan publik, DPMPTSP mendorong digitalisasi layanan melalui pengembangan *e-service* berbasis OSS-RBA dan aplikasi layanan internal. Kegiatan pada program ini antara lain integrasi data antar-instansi, penguatan sistem pengaduan online, serta pelatihan SDM pelayanan digital. Subkegiatan pentingnya termasuk peningkatan kapasitas petugas pelayanan, pemeliharaan infrastruktur TI, serta pengembangan dashboard pelayanan berbasis *real-time feedback*.

Untuk memperkuat efektivitas pelayanan, subkegiatan lainnya mencakup penyusunan standar pelayanan minimal, survei kepuasan masyarakat, dan penyediaan sarana fisik pelayanan seperti ruang ramah disabilitas dan ruang konsultasi usaha. Subkegiatan ini menjadi fondasi untuk menciptakan pelayanan yang responsif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat umum.

DPMPTSP juga mendukung program prioritas kepala daerah seperti “Kukar Green Investment”, “Kredit UMKM Idaman”, dan “MPP Digital Smart Service”. Subkegiatan yang mendukung antara lain fasilitasi pelaku usaha non-ekstraktif, penyusunan *business matching* antara UMKM dan investor, serta integrasi layanan perizinan dengan layanan pembiayaan UMKM. Hal ini sekaligus mendorong peningkatan IKU dalam investasi dan pelayanan.

Penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi instrumen strategis peningkatan IKPP. DPMPTSP melakukan kegiatan koordinasi penyatuan layanan antar-instansi, perluasan jenis layanan dalam satu pintu, dan peningkatan kualitas SDM frontliner MPP. Subkegiatan termasuk peningkatan fitur layanan mandiri, pemutakhiran sistem antrean digital, dan pelatihan etika pelayanan kepada seluruh petugas.

Seiring dengan arah pembangunan berkelanjutan, DPMPTSP fokus mendorong investasi ramah lingkungan. Program difokuskan pada sektor non-ekstraktif seperti *green agriculture*, energi terbarukan, dan ekowisata. Kegiatan dan subkegiatan diarahkan pada identifikasi proyek-proyek hijau, pendampingan penyusunan *green feasibility study*, dan fasilitasi insentif fiskal bagi investor hijau.

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijalankan oleh DPMPTSP disusun secara logis dan terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran kinerja berbasis hasil. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui indikator output, outcome, dan IKU yang relevan, khususnya realisasi investasi sektor non-ekstraktif dan capaian IKPP. DPMPTSP juga melakukan rewiu triwulanan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan secara sistematis dan terukur. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
1.	Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi non Ekstraktif	%	-54,17	0	1,35	2,70	4,05	5,40	6,70	
2.	Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu	Nilai	3,9	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4	

Salah satu Indikator Kinerja Kunci yang krusial adalah tersedianya regulasi dan insentif investasi daerah yang sempurna dan implementatif. Dalam konteks ini, penyusunan draf Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah yang mendorong sektor non-ekstraktif menjadi langkah strategis. Regulasi yang jelas memberikan kepastian hukum dan daya tarik bagi investor. Dengan mempercepat harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, DPMPTSP menciptakan iklim investasi yang kompetitif, sekaligus mempercepat pertumbuhan sektor-sektor ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Ketersediaan zona investasi prioritas yang memiliki akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi merupakan indikator kinerja kunci yang secara langsung mempengaruhi realisasi investasi. Ketika kawasan investasi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, risiko bisnis menjadi lebih rendah dan waktu pelaksanaan proyek lebih cepat. Oleh karena itu, pembangunan dan revitalisasi kawasan industri, kawasan pariwisata, dan sentra UMKM menjadi bagian integral dari strategi pengungkit IKU.

Pelayanan perizinan yang cepat dan transparan ditunjukkan melalui kinerja sistem digital perizinan yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS-RBA). Indikator kunci dalam domain ini mencakup kecepatan layanan, akurasi dokumen, serta kepuasan pemohon perizinan. Keberadaan sistem pelayanan digital yang efektif memungkinkan pengurusan perizinan menjadi lebih efisien dan bebas dari praktik maladministrasi, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan indeks kualitas pelayanan publik (IKPP).

Promosi dan fasilitasi investasi yang efektif juga menjadi indikator kunci lainnya. Implementasi promosi berbasis data, pemasaran terfokus, serta kegiatan fasilitasi yang terukur menjadi strategi penting dalam mendorong masuknya investasi ke sektor-sektor seperti industri kreatif, pertanian organik, pariwisata alam, dan energi baru terbarukan. Pelaksanaan misi dagang, *business matching*, serta penyusunan profil investasi tematik memperkuat nilai daya saing daerah di hadapan calon investor.

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja DPMPTSP juga sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM pelayanan yang kompeten dan bersertifikat. SDM yang profesional akan mampu memberikan pelayanan yang ramah, akurat, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan. Selain itu, integrasi sistem informasi penanaman modal menjadi indikator kunci yang memungkinkan analisis real-time terhadap potensi, persebaran, dan realisasi investasi. Sistem informasi yang terhubung

dengan dashboard nasional dan mampu memetakan investasi sektor non-ekstraktif secara spasial menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Adapun Indikator Kinerja Kunci dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilihat dari Permendagri 18 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahunan						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kutai Kartanegara	Persentase	-29,18	0	0,8	1,0	1,10	1,15	1,20	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	70	72,63	69,41	68,97	69,06	69,46	70,47	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Substansial

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan pembangunan sektoral yang strategis dalam rangka mendukung terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dan kualitas pelayanan publik yang unggul. Dokumen ini disusun berdasarkan prinsip evidence-based planning yang bertumpu pada isu strategis, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan RPJMD 2025–2029. Secara substansial, dokumen ini menegaskan pentingnya penguatan sektor non-ekstraktif dan transformasi pelayanan publik berbasis digital sebagai pilar utama pembangunan daerah ke depan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra ini mengikuti kaidah-kaidah perencanaan pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Setiap unit kerja dalam lingkungan DPMPTSP diwajibkan mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan. Pelaksanaan kegiatan juga memperhatikan prinsip harmonisasi antar-urusan, integrasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) dan pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP).

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara sistematis melalui mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) berbasis hasil. Evaluasi dilakukan secara triwulanan, semesteran, dan tahunan dengan berpedoman pada indikator kinerja yang ditetapkan. Setiap pelaksanaan program diukur melalui pencapaian output, outcome, dan dampaknya terhadap peningkatan realisasi investasi dan kepuasan masyarakat. Evaluasi juga mencakup ketepatan waktu, penyerapan anggaran, efektivitas pelaksanaan, dan kesesuaian antara rencana dan realisasi kinerja.

5.4 Evaluasi Berbasis Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, evaluasi dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan DPMPTSP, yaitu urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Evaluasi dilakukan untuk memastikan konsistensi implementasi kebijakan serta capaian program terhadap tujuan strategis daerah. Evaluasi ini menjadi dasar penyusunan laporan kinerja tahunan, perbaikan kebijakan, dan dasar pertanggungjawaban publik.

5.5 Tindak Lanjut

Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan dalam pelaksanaan Renstra tahun berikutnya. Evaluasi juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penyesuaian indikator kinerja, serta identifikasi kebutuhan reformulasi strategi jika terdapat deviasi signifikan dari target. Dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang terukur, diharapkan DPMPTSP dapat menjalankan tugas secara efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis investasi yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang inklusif.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR

Jalan : Wolter Mongisidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp 0811-5506-900

Website : dpmpptsp.kutaikartanegarakab.go.id Email: dpmpptsp@kutaikartanegarakab.go.id

T E N G G A R O N G

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-20/DPMPPTSP/SET.3/900/01/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara, diperlukan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPPTSP tahun 2025-2029 sebagai panduan perencanaan strategis;
- b. bahwa untuk mendukung penyusunan dokumen Rencana Strategis tersebut, perlu dibentuk tim penyusun yang melibatkan unsur terkait, termasuk akademisi untuk memperkuat kajian ilmiah dalam penyusunan Renstra;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005–2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2021
13. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025-2029.**

KESATU : **Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;**

KEDUA : **Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:**

1. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029.
2. Menghimpun data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra.

3. Melakukan analisis dan penyusunan dokumen Renstra berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan kajian dan analisis akademis terkait perencanaan strategis.
5. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Renstra dengan pihak-pihak terkait.
6. Melaporkan hasil penyusunan Renstra kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diteruskan kepada Bupati.

KETIGA : Tugas masing-masing anggota Tim Penyusun Renstra tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 02 Januari 2025


ALFIAN NOOR, SE-M.Ling
Pembina Utama Muda
NIP. 19690113 199503 1 005

Tembusanan :

1. Bupati Kutai Kartanegara
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR : B-20/DPMPTSP/SET.3/900/01/2025
 TANGGAL : 02 JANUARI 2025
 TENTANG : **TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025-2029**

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	JABATAN	KEDUDUDKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan Renstra. Mengambil keputusan strategis terkait penyusunan Renstra
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyusunan Renstra. Memastikan kelancaran komunikasi antar anggota tim.
KELOMPOK KERJA PENANAMAN MODAL			
3.	Tim Pengembangan Iklim Investasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji, menyusun rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah. Mengkaji, menyusun dan mengusulkan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal melalui kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah Memberikan rekomendasi teknis berdasarkan hasil kajian rencana rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
4.	Tim Promosi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dan mengembangkan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah; Menyusun kegiatan promosi penanaman modal didalam dan luar negeri; Menyusun bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal; Menganalisis dan memberikan rekomendasi teknis data promosi yang diperlukan.

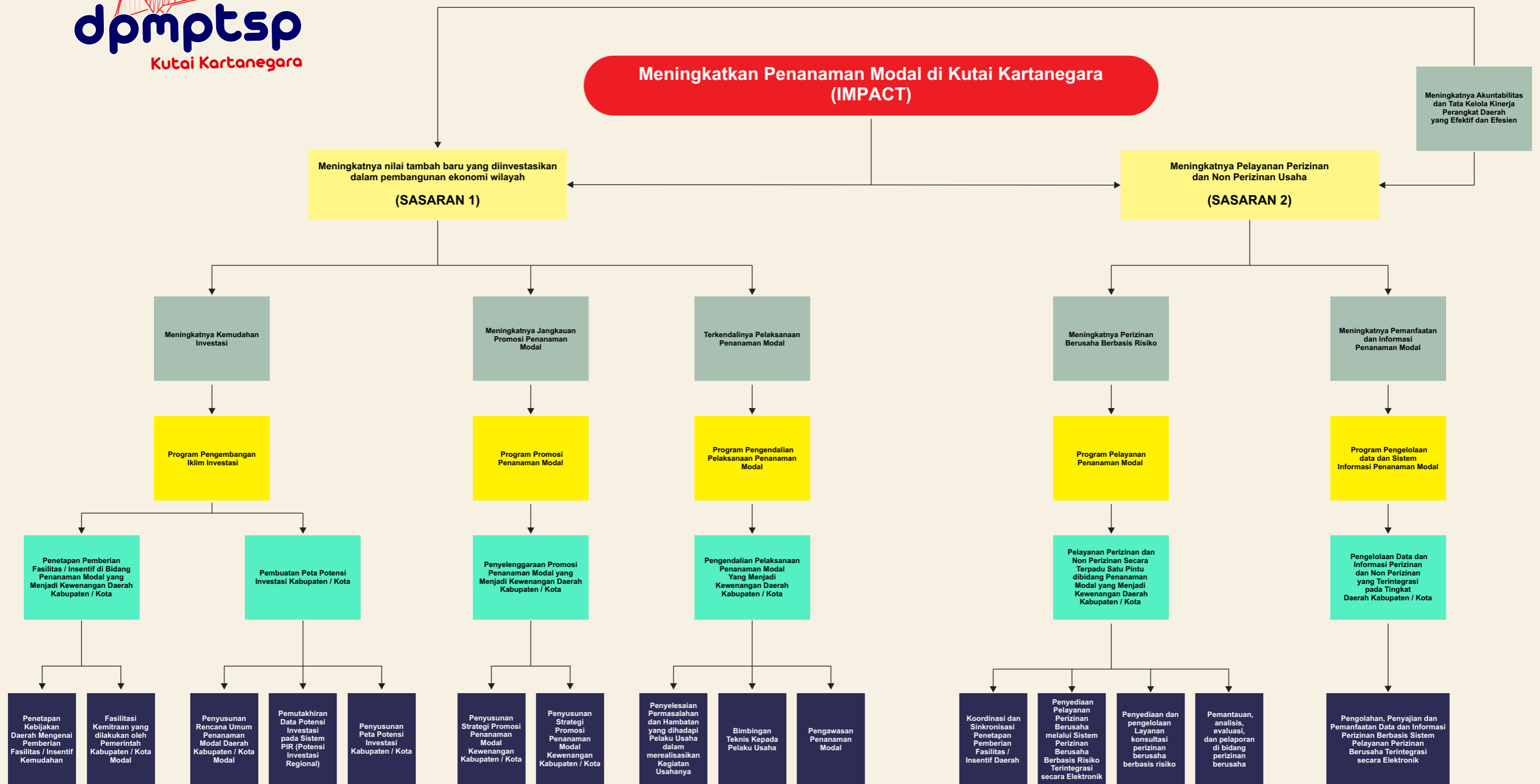
5.	Tim Pengendalian	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor dan wilayah; • Menyusun pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum; • Menyusun pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal • Memberikan rekomendasi teknis berdasarkan hasil data pengawasan, pembinaan dan penyelesaian masalah yang diperlukan kajian
KELOMPOK KERJA PTSP			
6.	Tim Fasilitasi Penanaman Modal	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kegiatan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan daerah; • Menyusun laporan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan; • Menyusun pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan • Membuat laporan pelaksanaan pelayanan, pengolahan pengaduan masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat dan layanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; • Memberikan rekomendasi teknis dan laporan berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan, pengaduan, penyuluhan.
7.	Tim Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Rekapitulasi Data perizinan Berusaha dan Non Perizinan; • Mengelola Data perizinan berusaha dan non perizinan sebagai data Informasi yang diperlukan; • Melakukan analisis dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan sesuai kewenangan ; • Membuat laporan pelaksanaan pengelolaan data perizinan berusaha dan non perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; • Memberikan rekomendasi teknis berdasarkan hasil pengolahan data perizinan dan non perizinan yang diperlukan

KELOMPOK KERJA SEKRETARIAT			
8	Pelaksana Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penulisan Renstra Mengolah data dan Menganalisis data
9	Kasubag Umum dan Tata laksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun Pengumpulan Data Aset Mengolah data dan menganalisis data
10.	Analisis SDA	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun Pengumpulan Data Kepegawaian Mengolah data dan menganalisis data
11.	Seluruh Pelaksana Program dan Keuangan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menghimpun Pengumpulan Data Keuangan dan Program Mengolah data dan menganalisis data Membantu administrasi kegiatan



ALFIAN NOOR, SE, M.Ling
Pembina Utama Muda
 NIP. 19690113 199503 1 005

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025 - 2029



Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien

**Meningkatkan Penanaman Modal di Kutai Kartanegara
(IMPECT)**

Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien
Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)
Sekretaris

Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah
Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi non Ekstraktif (%)
Kepala

Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha
Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (Nilai)
Kepala

Program Promosi Penanaman Modal
Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)
Ketua Tim Kerja Promosi PM

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (%)
Ketua Tim Pengendalian PM

Program Pelayanan Penanaman Modal
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)
Ketua Tim Pelayanan Perizinan & Non perizinan

Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (%)
Ketua Tim Data dan Sistem informasi

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen letter of intent (LOI)
Ketua Tim Kerja Promosi PM

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disusun
Ketua Tim Pengendalian PM

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SDP
Ketua Tim Pelayanan perizinan & Non Perizinan

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah
Ketua Tim Data dan Sistem Informasi

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)
PPTK

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota
Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)
PPTK

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)
PPTK

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)
PPTK

Pengawasan Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)
PPTK

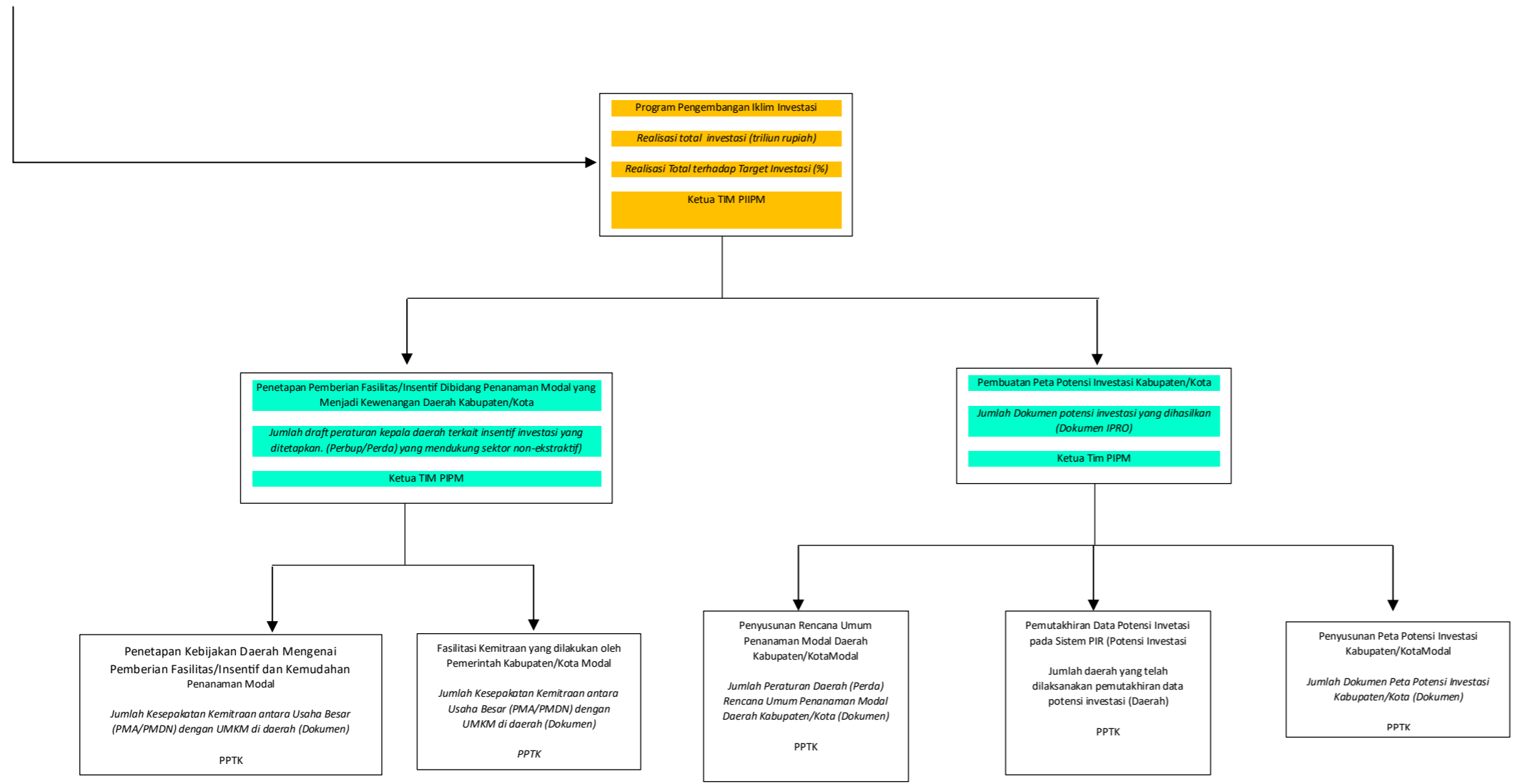
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)
PPTK

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)
PPTK

Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)
PPTK

Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)
PPTK

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)
PPTK



Meningkatkan Penanaman Modal di Kutai Kartanegara
(IMPECT)

Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi wilayah
Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Ekonomi non Ekstraktif (%)
Kepala

Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha
Indeks Pelayanan Publik Terpadu Satu Pintu (Nilai)
Kepala

Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien
Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)
Sekretaris

Beppeda, bependa, BPKAD, Bagian ORTAL, Bagian Tapem, BKPSDM, Inspektorat

Program Promosi Penanaman Modal
Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)
Ketua Tim Kerja Promosi PM

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha (%)
Ketua Tim Pengendalian PM

Program Pelayanan Penanaman Modal
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)
Ketua Tim Pelayanan Perizinan & Non perizinan

Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (%)
Ketua Tim Data dan Sistem informasi

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen letter of intent (LOI)
Ketua Tim Kerja Promosi PM

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disusun
Ketua Tim Pengendalian PM

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SDP
Ketua Tim Pelayanan perizinan & Non Perizinan

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah
Ketua Tim Data dan Sistem Informasi

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)
PPTK

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota
Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)
PPTK

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)
PPTK

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)
PPTK

Pengawasan Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)
PPTK

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)
PPTK

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)
PPTK

Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)
PPTK

Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)
PPTK

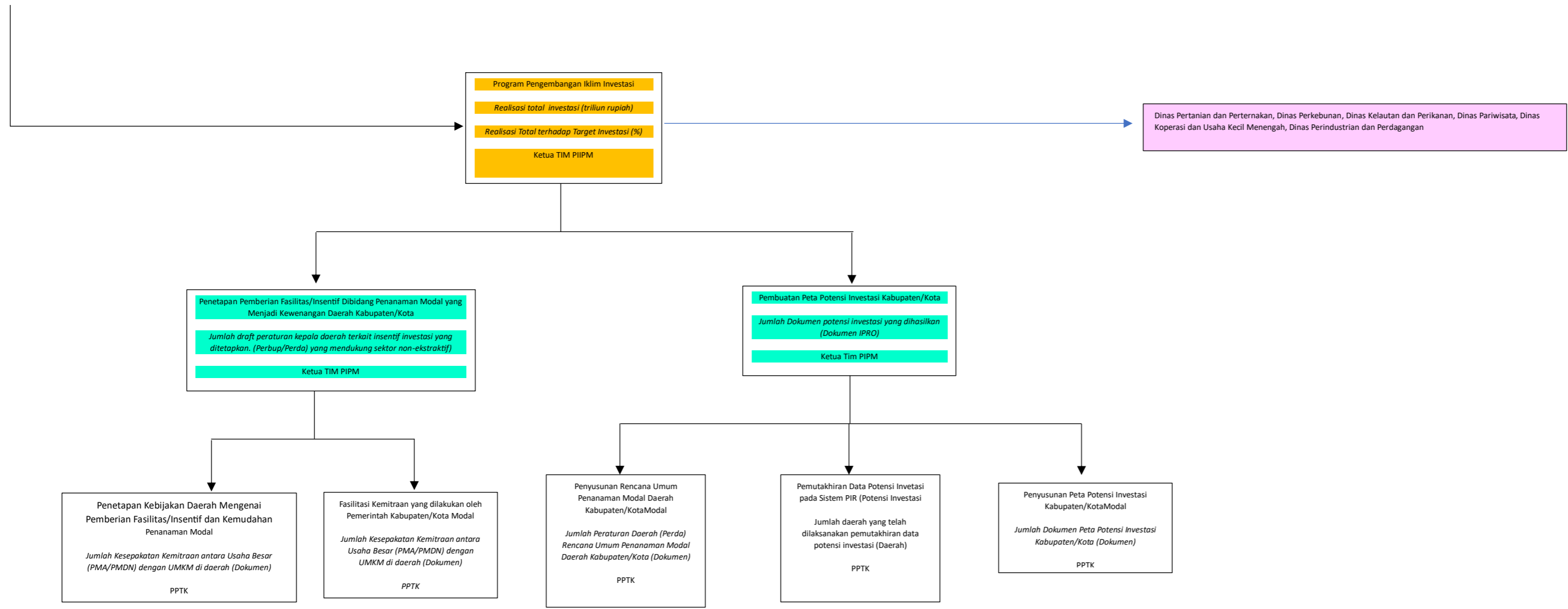
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)
PPTK

Dinas Pertanian dan Perternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Pertanian dan Perternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Dinas Pertanian dan Perternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan hidup dan kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Ushaa kecil Menengah, Dinas Kesehatan,

Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

*KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI DASAR
JALAN : WOLTER MONGONSIDI TENGGARONG
KODE POS 75511*